

Gema Desa

MEDIA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

GRAND PRAKTIK, 29 DESEMBER 2021



GUBERNUR JATIM TERIMA PENGHARGAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2021



DINAS PMD PROVINSI JAWA TIMUR
BERHASIL MEMBUKUKAN 26,06%
TOTAL TRANSAKSI



NANGKULA PARK
ALTERNATIF WISATA
DI TULUNGAGUNG

DAFTAR ISI

<i>Tabun 2021 Roda Kembali Bergerak</i>	02	
<i>Kaleidoskop Dinas PMD Provinsi Jatim Tahun 2021</i>	06	
<i>Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Berhasil Membukukan 26,06% Total Transaksi</i>	11	
<i>- Rakor Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan</i>	13	
<i>- Pelatihan Bagi Tim Kreatif Desa</i>	14	
<i>Sejahtera Berkat Sapi dan Ikan Koi</i>	18	
<i>Nongkula Park Alternatif Wisata di Talungagung</i>	20	
<i>Gubernur Khofifah Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Jatim dan Maluku</i>	27	
	31	
<i>Cerita pilu Desa Nagoro yang ditinggal penduduknya</i>	33	
	34	
	35	

Desa Beranda Depan Pembangunan

Ayo, Kenali Remaja Kita

5 Tips Membagi Waktu Antara Pekerjaan dan Keluarga

Kaki Indah Bebas Varises, Ini Cara Pencegahannya

5 Resep Olahan Kerang

Gema Desa adalah majalah yang diterbitkan setiap dua bulan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. Penerbitan majalah ini dimaksudkan untuk memberi informasi tentang pemberdayaan masyarakat Jawa Timur secara komprehensif. Gema Desa juga dimaksudkan sebagai media pembelajaran dan pemikiran yang kritis seputar pemberdayaan masyarakat dan gender.

PENGARAH: Soekaryo, S.H., M.M.
KETUA REDAKSI: Endah Binawati, M.SP., M.Si
REDAKTUR:
SEKRETARIS REDAKSI: Pandu Danuwara.SP
STAF REDAKSI: Sugeng Hariyadi, SE, Muzamil S.Kom, Mochmad Anas, SH, Dedy Agus Irwanto, SE, Suroto, Donny Marciano, S.Kom

ALAMAT REDAKSI:
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. A. Yani 152 C Surabaya
Telp 031.8292591, 8282183, Fax. 031.8292591

Tahun 2021 Roda Kembali Bergerak



Setelah tahun 2020 vakum dari semua kegiatan akibat pandemi Covid-19, tahun 2021 roda kembali bergerak—meski masih dalam pembatasan yang ketat. Demikianlah dengan banyak program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Tahun 2021 hampir semua kegiatan yang terpaksa “mati” di tahun 2020 “hidup” kembali di tahun 2021. Berbagai lomba diselenggarakan lagi, mulai Perlomba Desa/Kelurahan, Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan, Lomba BUM Desa. Bahkan lomba TTG di Desa dan Posyantek yang beberapa tahun vakum tahun 2021 ini diadakan lagi.

Demikian pula dengan Peringatan Puncak BBGRM XVII dan HKG PKK ke-48, tahun 2021 diselenggarakan lagi, di Sumenep. Peringatan Puncak BBGRM dan HKG PKK tahun 2020 absen. Penyelenggaraan Peringatan Puncak BBGRM dan HKG PKK yang tahun-tahun sebelumnya disertai pameran produk UKM, tahun ini ditiadakan.

Program-program yang lain juga bergerak, di antaranya Sinau nang Ndeso (Sinando). Juga sarasehan, seminar, bimtek, dan lain sebagainya. Bahkan Gubernur Jawa Timur meresmikan Tirtosari View di Lumajang.

Malahan di tahun 2021 ada program yang baru, yaitu Economic Hybrid Creative Idea and Business Competition Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, yang dihadiri Gubernur



Jawa Timur.

Satu prestasi diraih Provinsi Jawa Timur di tahun 2021, yaitu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021, mengumumkan bahwa jumlah desa mandiri dan maju di Jawa Timur tertinggi di antara provinsi lain se Indonesia.

Juga di tahun 2021 terjadi pergantian pucuk pimpinan di Dinas PMD Prov. Jatim. Soekaryo, SH., MM., diangkat menjadi Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 28 Agustus 2021, menggantikan Ir. Muhammad Yasin., M.Si. (menjadi Kepala Bappeda Prov. Jawa Timur).

Lalu Ir. Heru Suseno, M.T., Kepala Bidang Bina Pemerintahan Dinas PMD Prov. Jatim, per November 2021 menjadi Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.

Di sisi lain tahun 2021 kami berduka karena tim buletin Gema Desa, yaitu Pandu Danuwara, SP (Sekretaris Redaksi/Kasubag Penyusunan Program Dinas PMD Jatim) dan Suroto, SE. (staf redaksi/staf Subag Penyusunan Program) meninggal dunia. Semoga Tuhan menerima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Tahun 2021 gerbang kembali bergerak seperti sedia kala. Semoga tahun 2022 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. (*)

Rakornas BUM Desa

BUM Desa Jangan Mematikan Usaha Rakyat



Saat ini jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Indonesia mencapai 57.200. Jumlahnya melonjak 606 persen jika dibandingkan 2014, yang hanya 8.100 BUM Desa.

“Kenaikan dari BUM Desa drastis, naik 600 persen, tepatnya 606 persen dari 2014 sebanyak 8.100 (BUM Desa) melompat menjadi 57.200 BUM Desa,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Peluncuran Sertifikat Badan Hukum dan Peresmian Pembukaan Rakornas BUM Desa di Jakarta, Senin (20/12).

Meski jumlahnya melonjak, tapi Jokowi mengingatkan pemerintah daerah (pemda) tak berpuas diri. Kepala negara memerintahkan pengelola BUM Desa agar membuat kegiatan

yang berdampak langsung bagi warga desa setempat.

“Jangan terpaku pada jumlahnya, tapi kualitas aktivitas, kegiatan di dalamnya harus betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” papar Jokowi.

Ia meminta agar pengelola BUM Desa tak hanya sekadar mengurus sertifikat badan hukum, tapi tak ada kegiatan yang berarti di dalamnya. Jika itu terjadi, maka keberadaan BUM Desa tak akan berarti bagi rakyat sekitar.

“Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum, buat plang, tapi kegiatan di dalam tidak ada, kegiatan tidak jelas,” terang Jokowi.

BUM Desa, lanjut Jokowi, harus mengambil peran dalam memajukan ekonomi desa. Jangan sampai BUM Desa justru mematikan usaha rakyat.

“Misalnya, sudah ada toko kecil-kecil 5 sampai 10. Tiba-tiba BUM Desa buat toko lebih besar, yang 10 mati. Bukan itu. Semua harus memacu agar 10 toko tambah jadi 20 atau dari kecil jadi menengah,” jelas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan swasta agar menggandeng BUM Desa dalam menjalankan kegiatan usaha mereka di desa setempat. Dengan demikian dampak ekonominya akan langsung dirasakan rakyat sekitar.

“Nanti saya pesan ke swasta, BUMN, perkebunan, tambang yang ada di daerah desa untuk mengikutsertakan BUM Desa dalam kegiatan mereka, jangan yang di desa jadi penonton truk lalu lalang,” ucap Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tak mau warga desa hanya menonton hasil perkebunan dan tambang di daerah itu diambil begitu saja oleh pihak swasta atau BUMN. Jika itu terjadi, maka warga desa tak bisa menikmati sepenuhnya atas hasil perkebunan dan tambang di daerah itu.

“Jangan hasil perkebunan besar-besaran, rakyat hanya menonton, melihat tambang diambil keluar dari desa. Libatkan BUM Desa bersama kegiatan mereka (swasta dan BUMN),” pungkask Jokowi.

Jokowi meminta BUM Desa membangun usaha baru yang belum ada di desa, namun dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu peran BUM Desa lebih bermanfaat.

BUM Desa juga diminta membantu usaha rakyat dalam mencari pasokan bahan baku untuk produksi di bidang pertanian atau perkebunan. “Misalnya beli pupuk, tidak usah sendiri-sendiri, bisa dikonsolidasikan di BUM Desa,” ujar Jokowi.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021. BUM Desa ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Jokowi menegaskan bahwa sejak 2014 pemerintah telah berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran dan perbatasan, serta tidak lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia

sentris. BUM Desa ini diharapkan menjadi salah satu medium untuk membangun pedesaan.

Jokowi berjanji akan meminta BUMN dan perusahaan swasta yang beroperasi di desa untuk turut serta melibatkan BUM Desa dalam kegiatan usahanya.

Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan saat ini proses revitalisasi BUM Desa masih terus berlangsung. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) terus mendorong perbaikan manajemen, menambah permodalan, hingga menuntaskan proses transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan, menjadi BUM Desa Bersama. Selain itu, Kemendes PDTT terus memfasilitasi BUM Desa untuk mengajukan status badan hukum.

“BUM Desa merupakan salah satu instrumen kebangkitan desa. Dengan adanya status badan hukum maka BUM Desa akan kian berpotensi menjadi kekuatan ekonomi Indonesia di masa depan,” ujarnya di kesempatan yang sama.

Dia menjelaskan saat ini BUM Desa bersama UMKM, ultra mikro dan koperasi berkontribusi terhadap 61% dari total produk domestik bruto (PDB) nasional. Menurutnya fakta ini menunjukkan jika BUMDes mempunyai peran sangat penting bagi kebangkitan ekonomi nasional terutama setelah dihantam resesi akibat Pandemi Covid-19.

“Lahirnya UU Cipta Kerja yang memberikan status badan hukum bagi BUM Desa kian menguatkan BUM Desa sebagai entitas ekonomi yang mempunyai kedudukan yang sama dengan entitas ekonomi lainnya sehingga peluang berkembang

akan sama besar,” katanya.

Gus Halim-sapaan akrab Abdul Halim Iskandar- juga mengungkapkan nilai valuasi BUM Desa di Indonesia lebih dari Rp20 triliun. Sebagai gambaran hasil konsolidasi UPK eks PNPM Mandiri Pedesaan, menjadi BUM Desa Bersama saja bernilai sekitar Rp12,4 triliun. Sedangkan saat ini ada 57.288 BUM Desa dengan berbagai kondisi di seluruh Indonesia.

“Harapan masyarakat terhadap BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi juga semakin tinggi. Buktinya selama pandemi ini pendirian BUM Desa juga masih terus berlangsung. Selama 2020-2021 saja ada 6.197 BUM Desa yang berdiri,” katanya.

Dalam kesempatan itu Gus Halim juga melaporkan pembentukan desa terpadu berkelanjutan sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo agar desa berkontribusi dalam menciptakan ketahanan pangan. Selain itu juga dilaporkan penggunaan dana desa dan kontribusi dana desa dalam melawan kemiskinan ekstrim maupun jaring pengaman sosial selama pandemi Covid-19.

Gus Halim juga melaporkan hingga 17 Desember 2021, tercatat sebanyak 26.741 BUMDes mengajukan registrasi nama, dan 5.042 BUMDes melakukan pendaftaran sebagai Badan Hukum. Selain itu, ada 1.641 BUMDes Bersama telah melakukan registrasi nama, dan 79 BUMDes Bersama yang melakukan pendaftaran sebagai Badan Hukum.

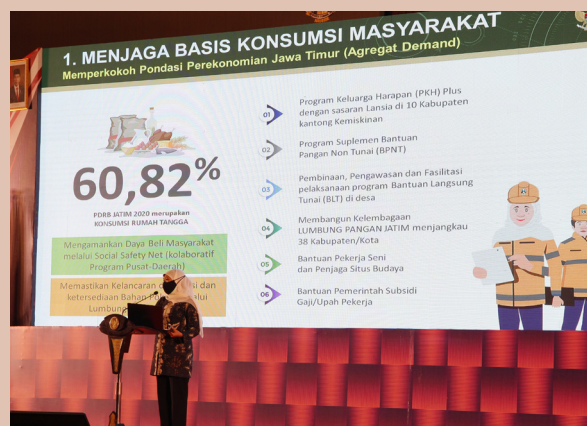
“Hingga tahun 2021 ini telah ada 57.288 BUMDes di seluruh Indonesia. Kami targetkan semuanya segera menjadi Badan Hukum yang kuat dan berdaya,” kata Gus Halim dengan tegas. (*)

Jatim Tercepat Nasional dalam Penyaluran Dana Desa 2021

Provinsi Jawa Timur mencatat rekor lagi sebagai provinsi tercepat dalam penyaluran Dana Desa tahun 2021. Secara nasional, hingga Februari 2021 baru tiga kabupaten yang berhasil menyalurkan Dana Desa tercepat, yaitu Kabupaten Madiun, Tulungagung dan Kabupaten Tapaktuan di Provinsi Aceh.

Bupati Madiun dan Bupati Tulungagung menerima penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan karena telah berhasil menyalurkan Dana Desa Tercepat Nasional Tahap I tahun 2021. Penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa saat Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Desa dan Konsolidasi Pendampingan Desa di Pyandra Convention, Jumat, 12 Februari 2021.

Tahun 2021 di Jawa Timur sejumlah 7,659 triliun baru tersalur di 709 desa di 5 Kabupaten Tulungagung, Madiun, Ngawi, Paitan dan Magetan dengan nominal Rp 242,1 milyar. Sedangkan BLT-DD baru cair 260 desa di



Kabupaten Tulungagung dan Madiun dengan total penerima 14.225 KPM sejumlah Rp 4,26 milyar.

Sepanjang 2020 Jawa Timur mampu merealisasikan 99,97 persen dengan total nilai dana desa yang disalurkan Rp 7,568 triliun, dari alokasi keseluruhan Rp 7,570 triliun. Hanya 9 desa dari 7.724 desa di Jatim yang belum menyalurkan 100 persen. (*)

Sembilan Inovasi Siap Makin Murnikan Jawa Timur

Selama dua hari berturut-turut, 17 – 18 Februari 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, menyelenggarakan rapat koordinasi dengan tema “Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19 Melalui Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021.” Rakor dilaksanakan secara daring dengan peserta dari DPMD kab/kota se-Jawa Timur dan Bakorwil di Jawa Timur.

Dalam rakor ini diluncurkan sembilan inovasi Dinas PMD Prov. Jatim tahun 2021, yaitu Lumpang Bude, Klinik BUM Desa, Penyetan Bunda (Penyelamatan Aset UPK Melalui BUM



Desa Bersama), Paman Desa (Penguatan Permodalan BUM Desa), Desa Berdaya, Bibit Jamur Bank (Bimbingan Teknis dan Pinjaman Murah Melalui Bank),

Sapa Desa (Sistem Informasi Pendataan Desa), Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan), Si Manis Desa (Sistem Administrasi Pemerintahan Desa). (*)

Gubernur Salurkan Bantuan Program Jatim Puspa

Bertempat di Ponorogo, 6 April 2021, dalam rangka Jatim Bangkit 2021, Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan bantuan senilai total Rp 728.375.000 bagi 10 desa untuk bantuan usaha program Jatim Puspa dan BUM Desa dan Desa Berdaya di Ponorogo.

Bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan melalui program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan) tersebut disalurkan berbentuk modal usaha bagi kelompok perempuan dengan sasaran 67 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 3 tiga desa, yaitu Desa Sendang, Kecamatan Ngrayun, sebesar Rp 57.375.000, Desa Temon, Kecamatan Sawoo, sebesar Rp 65.125.000 dan Desa Sawoo Kecamatan Sawoo, sebesar Rp 80.875.000.

Jatim Puspa bertujuan meningkatkan keberdayaan sosial ekonomi rumah tangga ber-



basis perempuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup di tengah pandemi, sekaligus membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Tahun 2021 dialokasikan di 30 kabupaten/kota dengan memberikan stimulan modal usaha produktif senilai Rp 2,5 juta setiap KPM. Tahun ini, program Jatim Puspa menjangkau 5.294 KPM di 175 desa pada 30 kabupaten/kota dengan total anggaran yang disediakan Rp. 15,606 miliar.

Sasaran Program Jatim Puspa antara lain KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang

sudah graduasi mandiri sejahtera dan rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 8-12 persen terendah yang memiliki anggota rumah tangga perempuan yang memiliki usaha serta memiliki anak masih sekolah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2020 yang dirilis oleh Kementerian Sosial.

Sebelumnya, pada 20 Maret 2021, Gubernur juga menyalurkan bantuan senilai total Rp 1.690375.000 bagi 19 desa untuk bantuan usaha Program Jatim Puspa, BUM Desa dan Desa Berdaya di Tuban. (*)

Gubernur Resmikan Tirtosari View

Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa pada 30 Mei 2021 meresmikan Wisata Desa Tirtosari View di Dusun Sumbersari, Desa Penanggal, Kec. Candipura, Kab. Lumajang.

Wisata Tirtosari View salah satu pilot project Provinsi Jawa Timur, karena mempunyai konsep yang cerdas dan inovatif. Menurut Gubernur, Tirtosari View patut dijadikan percontohan nasional maupun dunia.

Konsep itulah yang menjadikan Desa Penanggal patut mendapat apresiasi Pemerintah Jawa Timur, sebagai desa wisata alam dan wisata amal. Pendapatan yang diperoleh dari desa wisata tersebut akan didistribusikan untuk elemen masyarakat yang berkontribusi bagi lingkungan sekitar.

"Kadang banyaknya rejeki menjadi musibah, tapi dengan banyaknya rejeki menjadi berkah.



Konsep wisata alam dan wisata amal ini luar biasa sekali. Bahwa sebagian income dari pengelolaan desa wisata ini akan dikembalikan dalam program pemerintah desa seperti bantuan bagi warga yang meninggal, bantuan operasional masjid, sampai dengan tunjangan bagi guru ngaji dan guru kontrak yang ada di desa ini. Insya Allah ini menjadi ladang amal jariah bapak ibu, dan banyaknya rejeki akan membawa keberkahan," kata Gubernur. (*)

Jumlah Desa Mandiri di Jatim Tertinggi Secara Nasional



Satu prestasi diraih lagi oleh Provinsi Jawa Timur. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT), berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021, mengumumkan bahwa jumlah desa mandiri dan maju di Jawa Timur tertinggi di antara provinsi lain se Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam SK Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dirilis tanggal 19 Agustus 2021.

Ini menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di Jawa Timur terus menunjukkan perkembangan yang positif tidak hanya di wilayah perkotaan, melainkan juga di tingkat pedesaan. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya keberadaan desa dengan status Mandiri dan Maju serta tidak adanya lagi desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal.

Dalam pemutakhiran data IDM tahun 2021, tercatat 3.269 desa di Indonesia dinyatakan sebagai desa mandiri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 697 desa atau 21,32 persen berada di Jatim. Pencapaian ini merupakan yang tertinggi di Indonesia dan selanjutnya disusul oleh Jawa Barat di peringkat kedua dengan total 586 desa mandiri serta di peringkat ketiga Provinsi Jawa Tengah dengan total 199 desa mandiri.

Tidak hanya status desa mandiri yang tertinggi, desa dengan status maju di Jatim juga tercatat mendominasi secara nasional dengan total 3.283 desa. Angka ini diikuti oleh Jawa Tengah dengan total 2.295 desa maju dan Jawa Barat sebanyak 2.102 desa maju. (*)

Soekaryo Jadi Kepala Dinas PMD Provinsi Jatim

Soekaryo, SH., MM., diangkat menjadi Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur pada Rabu, 28 Agustus 2021 menggantikan Ir. Muhammad Yasin., M.Si. (menjadi Kepala Bappeda Prov. Jawa Timur). Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/3583/204/2021. Soekaryo sebelumnya menjadi Plt Kepala Biro Administrasi Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Menjadi sorotan Soekaryo adalah bagaimana stunting di desa bisa turun. Seperti diketahui saat ini angka stunting di Jawa Timur secara persentase mencapai 26,8 persen. Menurut Soekaryo, salah satu penyebab stunting bisa jadi karena air yang dikonsumsi kurang air bersih.

“Kami pernah ngomong-nyomong dengan ahli bagaimana air bisa menjadi salah satu solusi stunting. Dengan minum air yang bersih maka orang diare bisa diatasi. Air di masing-masing desa ada tapi kadang-kadang ada yang tidak layak minum. Bagaimana nanti air di seluruh Jawa Timur ini menjadi air layak minum. Kami akan bekerjasama dengan Balai Kesehatan Lingkungan, di mana dari sini akan membangun Jawa Timur menjadi lebih sehat,” kata mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr Soedono Madiun ini.

Dengan adanya program semacam itu, Soekaryo berharap angka stunting di Jatim menurun. “Semoga angka stunting menurun karena kalau melihat ritmenya



hingga 2024, mungkin bisa turun sampai 14 persen,” jelasnya. Nanti akan diperbandingkan antara sebelum dan setelah adanya program air bersih ini. (*)

Gubernur Hadiri Economic Hybrid Creative Idea and Business Competition Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat



Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa menghadiri Economic Hybrid Creative Idea and Business Competition Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Universitas Brawijaya, Kadin Jatim serta Times Indonesia di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jumat, 22 Oktober 2021.

Dalam pesannya Gubernur mengajak pelaku industri kreatif di Jawa Timur untuk meningkatkan produk ramah lingkungan atau pro lingkungan dalam menjalankan proses produksinya. Pasalnya, Ekonomi Global serta tuntutan pasar, mendorong semua industri untuk melakukan

pendekatan bisnis yang juga berbasis lingkungan.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Gubernur juga memberikan hadiah secara simbolis kepada 5 pelaku usaha yang telah mengikuti rangkaian acara selama 1 bulan secara online yang diikuti 120 peserta dari berbagai daerah.

Untuk juara I diraih Carakabumi - Hilda Lu'lu'in dari Kab. Kediri, Juara II diraih Sandalku - Nicki dari Kota Surabaya, dan Juara III diraih Samawa Ecoprint - Lina Sofarida dari Kab. Kediri. Lalu untuk harapan I diberikan kepada Kerajinan Pelepah Pisang Pa'e Debog - Maisir dari Kab. Bojonegoro, dan harapan II diberikan kepada UD. Prima Usaha Garisan - Sinyie Wulandari dari Kab. Tulungagung. (*)

Kadis PMD Serahkan Tropi Juara Lomba Desa, BUM Desa, Video Kreatif, TTG dan Posyantek

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Soekaryo, S.H., MM., Senin, 11 Oktober 2021, di Hotel Harris Surabaya, menyerahkan tropi pemenang Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2021.

Pada saat yang sama juga dilakukan penyerahan tropi untuk Lomba BUM Desa, Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan, Lomba Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa/Antara Desa dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

Kategori Pengembangan TTG di Desa tingkat Provinsi Jawa Timur pemenang I diraih Kabupaten Trenggalek (penggorengan gempo), pemenang II diraih Kabupaten Kediri (alat semai modern berbasis pengolahan limbah (coopers), pemenang III Lipat Hari Sukarno (penjernihan air).

Kategori Lomba Posyantek Desa tingkat Provinsi Jatim pemenang I diraih Posyantek Bersinar (Kab. Tulungagung), pemenang II Posyantek Tunggal Maju (Kab. Jombang) dan pemenang III Posyantek Hasta Karya (Kab. Trenggalek)

Kategori Lomba Desa pemenang I diraih oleh Desa Bendosari, Kec. Sanan Kulon, Kab. Blitar, pemenang II Desa Paringan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, pemenang III Desa Pule, Kec. Sawahan, Kab. Madiun, pemenang IV Desa Lobuk, Kec. Bluto, Kab. Sumenep, pemenang harapan I Desa Kemangi, Kec. Bungah, Kab. Gresik, dan pemenang harapan II Desa Sambibulu, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.



Adapun Lomba Kelurahan, pemenang I diraih Kelurahan Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun, pemenang II Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, pemenang III Kel. Gading Kasri, Kec. Klojen, Kota Malang, pemenang IV Kel. Gedongan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto.

Pemenang Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan tahun 2021 juara I diraih Desa Bangsring, Kec. Wogsorejo, Kab. Banyuwangi, juara II Desa Ketapanrame, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto, juara III Desa Sungonlegowo, Kec. Bungah, Kab. Gresik, juara harapan I Desa Ngunu, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, juara harapan II Desa Penanggri, Kec. Candipuro, Kab. Lumajang, juara favorit Desa Kojapanan, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan. (*)

Gubernur Hadiri Puncak Peringatan BBGRM XVII dan HKG PKK ke-48



Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa, bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Listianto Dardak, menghadiri peringatan pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVII dan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK) ke-48 di Gedung Graha Adi Poday, Sume-

nep, Minggu, 31 Oktober 2021.

Pada kesempatan tersebut Gubernur menyerahkan piagam penghargaan kepada pelaksana terbaik gotong royong kategori desa dan kelurahan tingkat Jawa Timur.

Kategori desa pelaksana terbaik pertama diraih Desa Pondok, Kec. Babatan, Kab. Ponorogo, pemenang dua Desa Madiredo, Kec. Pujon, Kab. Malang, pemenang tiga Desa Kluncing, Kec. Licin, Kab. Banyuwangi, pemenang empat Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar.

Kategori kelurahan pemenang pertama Kelurahan Gedongan, Kec. Magersari, Kota Mojokerto,

pemenang kedua Kelurahan Plosokerep, Kec. Sanan Wetan, Kota Blitar, pemenang ketiga Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, pemenang keempat Kelurahan Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo.

Peringatan BBGRM XVI dan HKG PKK ke-45 tahun 2019 dilaksanakan di Kabupaten Situbondo. Tahun 2020 absen karena pandemi Covid-19. Baru tahun 2021 ini dilaksanakan lagi di Sumenep. Bila tahun-tahun sebelumnya peringatan BBGRM dan HKG PKK dimeriahkan bazar UMKM maka tahun ini ditiadakan. (*)

Pemprov Jatim Kembangkan Jatim Bejo

Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Berhasil Membukukan 26,06% Total Transaksi

Pemprov Jawa Timur menggunakan momen Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) sebagai ajang mempromosikan penggunaan Program Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo).

Jatim Bejo sendiri adalah upaya internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang/jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan *e-marketplace* dalam bentuk toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jatim, sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan transparansi, akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

Menurut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa Program Jatim Bejo ini menjadi andalan Pemprov Jatim terkait sistem belanja online di pemerintahan. Program tersebut mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektronik B2B (*business to business e-commerce*) di Indonesia yang terus meningkat. Bahkan platform B2B *e-commerce* kini semakin populer digunakan pembeli, terutama dari kalangan pemerintah, dalam melakukan transaksi pengadaan



Gubernur Hj. Khofifah Indar Parawansa memperhatikan salah satu produk UKM.

barang dan jasa.

Untuk mengembangkannya, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Bank Jatim dan Mbizmarket selaku pemilik *e-marketplace* yang bekerjasama dengan Jawa Timur sedang mengembangkan fitur baru untuk pembayaran dengan cara *virtual account*.

“Harapannya, pembayaran bisa menjadi semakin cepat dan akuntabel. Sejalan dengan itu juga tepat pada tanggal 22 November 2021 telah dimasukkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 61 Tahun 2021 Ten-

tang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Melalui Toko Daring di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Di mana salah satunya terkait batasan transaksi meningkat yang awalnya hanya Rp. 50 juta sekarang telah menjadi Rp. 200 juta, sesuai Keputusan Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP No. 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penye-

BERITA

lenggaraan Toko Daring,” ujar Khofifah ditemui di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Lamongan, Minggu (12/12),

Berdasarkan laporan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Jatim per 30 November 2021, Khofifah memaparkan, transaksi pengadaan barang dan jasa melalui Program Jatim Bejo mencapai Rp. 35,8 Milyar yang berasal dari 13.701 pesanan.

“Transaksi tersebut menorehkan hasil yang baik karena tertinggi se-Indonesia melalui belanja toko daring. Hingga saat ini juga sudah terdapat 1.659 penyedia dan 29.477 produk yang sudah tayang pada Program Jatim Bejo,” jelas orang nomor satu di Jatim itu.

Tak hanya itu, jelas Khofifah, hingga saat ini sudah terdapat 24 pemkab/pemko yang sudah menyatakan komitmen menggunakan Program Jatim Bejo melalui surat dari Kepala Daerah maupun Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, diantaranya yaitu Pemerintah Kota Malang, Batu, Kediri, Madiun, Probolinggo dan Mojokerto, kemudian untuk Pemerintah Kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Tuban, Gresik, Lumajang, Blitar, Nganjuk, Situbondo, Sidoarjo, Trenggalek, Malang, Banyuwangi, Tulungagung, Jember, Pasuruan, Bangkalan, Probolinggo, Magetan dan Pacitan.

Oleh karena itu, Khofifah panggilan akrab Gubernur Jatim itu berharap melalui penggunaan Jatim Bejo bisa semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace da-



lam bentuk toko daring.

“Jatim Bejo menjadi Ikhtiar bersama untuk membangun sekaligus meningkatkan akuntabilitas, transparansi di antara kita utamanya dalam pengadaan barang/jasa baik pemprov, pemkab/pemko se-Jatim,” jelas orang nomor satu di Jatim.

Melalui Program Jatim Bejo, Khofifah pun menyambut optimis nanti pada tahun 2022 semakin besar total transaksi serta semakin banyak pemkab/pemko di Jatim yang akan bergabung dan menggunakannya karena sejalan dengan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui e-payment, e-katalog dan e-marketplace.

“Insya Allah sesuai *tagline* tahun 2022, Optimis Jatim Bangkit. Jatim Bejo turut menunjang optimisme Jatim Bangkit. Transaksi semakin besar, semakin banyak pemkab/pemko yang bergabung pada Jatim Bejo,” harapnya.

Tak hanya itu, Khofifah juga berharap Jatim Bejo mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil (UKM). Dimana hal tersebut sejalan de-

ngan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa e-marketplace atau belanja online bisa menunjang UKM dalam menemukan akses market yang lebih luas dan besar.

“Dalam arti yang lebih luas platform ini harus mampu menciptakan perlindungan berusaha kepada pelaku usaha, baik UMKM maupun pelaku usaha menengah dan besar secara proporsional dan adil,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim itu.

“Insya Allah dengan Jatim Bejo terus bisa memberikan support akses bagi para UMKM yang telah menjadi backbone perekonomian di Jatim. Pasalnya UMKM telah berkontribusi bagi PDRB Jatim sebesar 57,25%,” imbuhnya.

Dalam acara Awarding Jatim Bejo 2021, Dinas PMD Provinsi Jawa Timur berhasil membukukan 26,06% total transaksi dan total pesanan dari keseluruhan OPD. Besarnya capaian ini membuat Dinas PMD berhasil menduduki peringkat 5. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur di Dyandra Convention Center, Surabaya. (*)

Rakor Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan



Rakor Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten Tahun 2021 berlangsung di Hotel Savana, Malang, 18-19 November 2021.

Acara dibuka oleh Soekaryo, SH, MM., Kepala Dinas PMD Prov. Jatim dengan didampingi Kasubid Kemasyarakatan Desa Drs Edy Kunchahyo, M.Si., selaku Ketua Panitia Rakor TKPKP Tingkat Provinsi dan Kabupaten tahun 2021.

Peserta Rakor berjumlah 82 orang yang terdiri dari Tim TKPKP Provinsi sebanyak 22 Orang dan 60 orang dari Dinas PMD 29 kab/1 Kota Batu serta Bappeda 29 kab/1 Kota Batu dengan bertindak sebagai narasumber dari Bappeda Prov. Jatim.

Kegiatan Rakor Tim Pembangunan Kawasan Perdesaan tingkat Provinsi dan Kabu-

paten Tahun 2021 bertujuan mensinkronisasikan kegiatan kawasan perdesaan di wilayah Jawa Timur dengan mempertimbangkan kegiatan-kegiatan program kawasan pada lintas sektor baik di tingkat provinsi dan kabupaten sehingga peran Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan tingkat provinsi dan kabupaten bisa berjalan maksimal dalam rangka percepatan pembangunan kawasan melalui pengelolaan potensi potensi dalam kawasan.

Dari acara rakor ini diharapkan kabupaten dapat segera membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan maksud pengembangan kawasan di wilayah kabupaten bisa segera terwujud dan dilaksanakan secara terpadu antar lintas sektor sesuai dengan perannya masing-masing. (*)

Pelatihan Bagi Tim Kreatif Desa



Dalam rangka menambah wawasan, pengetahuan dan meningkatkan keterampilan dari tim kreatif desa dalam mengidentifikasi, mengolah dan menampilkan serta membranding ikon desa sehingga dapat dikenal secara luas dan hara-

panya dapat meningkatkan pemulihan ekonomi di desa di masa pandemi Covid-19, Dinas PMD Prov. Jatim menyelenggarakan pelatihan bagi Tim Kreatif Desa dengan peserta 151 Desa Mandiri yang mendapatkan Program Desa Berdaya Tahun 2021.

Pelatihan yang bertempat di Hotel Selecta Kota Batu ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas PMD Prov. Jatim Soekaryo, SH, MM didampingi Kabid PUED Endah Binawati, SP, MSi dan Tenaga Ahli dari Universitas Brawijaya Prof Maftuch.

Pelatihan dibagi menjadi 2 angkatan. Angkatan I tanggal 14-16 November 2021 dan angkatan II tanggal 17-19 November 2021 dengan menghadirkan narasumber tenaga ahli dari LPPM Universitas Brawijaya dan tenaga ahli ikonik branding yang merupakan praktisi profesional branding produk. (*)

Gubernur Jatim Dapat Penghargaan “Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2021”



Gubernur Jawa Timur dan Menteri Desa PDPT memberi sambutan



Gubernur Jawa Timur menerima penghargaan dari Menteri Desa PDPT

Mengakhiri tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mendapat kado istimewa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kementerian Desa PDPTT). Penghargaan itu karena Provinsi Jawa Timur berhasil mendorong percepatan pembangunan desa sehingga sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Jatim.

Penghargaan “Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2021” tersebut diterima Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Kementerian Desa PDPTT). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Desa PDPTT RI Abdul Halim Iskandar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (29/12/2021).

Saat ini, 7.724 desa di Jawa Timur telah mencapai status berkembang, maju, dan mandiri, serta tidak ada lagi desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal.

Selain Gubernur Khofifah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI juga memberikan penghargaan kepada 30 kepala daerah di Jatim yang terdiri dari 29 Bupati dan 1 Wali kota yakni Walikota Batu yang dinilai berhasil melakukan percepatan pembangunan desa.

Kota Batu mendapatkan penghargaan kategori Utama karena keseluruhan desanya memiliki status perkembangan desa mandiri. Sementara 29 kabupaten lainnya mendapatkan penghargaan kategori Pertama karena seluruh desanya memiliki status perkembangan desa berkembang, maju, dan mandiri.

Ke-29 kabupaten itu yakni Tulungagung, Tuban, Trenggalek, Sumenep, Situbondo, Sidoarjo, Sampang, Probolinggo, Ponorogo, Pasuruan, Pamekasan, Pacitan, Ngawi, Nganjuk, dan Mojokerto. Selain itu juga Kabupaten Malang, Magetan, Madiun, Lumajang, Lamongan, Kediri, Jombang, Jember, Gresik, Bondowoso, Bojonegoro, Blitar, Banyuwangi dan Kabupaten Bangkalan.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh pihak yakni para bupati di Jatim dan Wali Kota Batu, para kepala desa, para pendamping desa, serta masyarakat desa

yang ikut berkontribusi dalam pemerataan pembangunan di Jatim.

Di mana pemerataan pembangunan di Jatim terus menunjukkan perkembangan yang positif tidak hanya di perkotaan, tapi juga di pedesaan. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya keberadaan desa dengan status mandiri dan maju serta tidak adanya lagi desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal di Jatim.

“Keberhasilan ini juga tidak lepas dari kerja keras semua pihak. Maka saya menyampaikan terima kasih kepada para Bupati dan Walikota Batu, Kepala Dinas PMD, camat, kepala desa dan seluruh pendamping desa, serta perguruan tinggi yang telah melakukan pendampingan sehingga tercapainya peningkatan terhadap status Indeks Desa Membangun di Jatim,” katanya.

Khofifah mengatakan, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 Kementerian Desa PDPTT, jumlah desa mandiri dan maju di Jatim tertinggi di antara provinsi lain se Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam SK Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 398.4.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa yang dirilis tanggal 19 Agustus 2021.

Dalam pemutakhiran data IDM tahun 2021, tercatat 3.269 desa di Indonesia dinyatakan sebagai desa mandiri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 697 desa atau 21,32 persen berada di Jatim. Pencapaian ini merupakan yang tertinggi di Indonesia dan selanjutnya disusul oleh Jawa Barat di peringkat kedua dengan total 586 desa mandiri serta di peringkat ketiga Provinsi Jawa Tengah dengan total 199 desa mandiri.

Tidak hanya status desa mandiri yang tertinggi, desa dengan status maju di Jatim juga tercatat mendominasi secara nasional dengan total 3.283 desa. Angka ini diikuti oleh Jawa Tengah dengan total 2.295 desa maju dan Jawa Barat sebanyak 2.102 desa maju.

Berdasarkan hal tersebut, Khofifah turut menyampaikan

rasa syukurnya karena pembangunan di tingkat pedesaan terus tumbuh baik berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang menjadi dasar dalam mengukur IDM.

“Hal ini dikarenakan pembangunan desa yang baik di Jatim tersebut mampu berseiring dengan laju penurunan angka kemiskinan di tingkat pedesaan khususnya pada Tri – Wulan II Tahun 2021. Selain itu yang harus kita syukuri saat ini ada 697 desa mandiri di Jawa Timur, yang merupakan jumlah terbanyak secara nasional,” katanya.

Tidak hanya itu, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, per 21 Juli 2021 menyebutkan bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di Jatim paling tipis jika dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Sementara itu, kontribusi terbesar angka penurunan kemiskinan di Jatim berada di wilayah pedesaan dengan total penurunan sebanyak 33.246 orang.

“Keberhasilan mengentas Jatim dari desa tertinggal dan sangat tertinggal ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim dalam mengentaskan desa tertinggal dan mendorong kemandirian desa melalui berbagai program. Seperti program Desa Berdaya dan Paman Desa yang memberikan stimulus berupa permodalan di tingkat desa,” ujarnya.

Khofifah menjelaskan bahwa Program Desa Berdaya ini sendiri fokus pada empat aspek utama. Antara lain menumbuhkan inovasi untuk menggerakkan perekonomian desa berbasis potensi dan sumberdaya secara kreatif dan berkelanjutan. Kedua, mendorong hadirnya ikon desa yang khas melalui economic branding berbasis inovasi.

Kemudian ketiga, optimalisasi penggunaan dana desa untuk mendorong pertumbuhan ikon desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Terakhir, menciptakan praktik keteladanan (good practices) sehingga menjadi sumber inspirasi.

Untuk mendukung program tersebut, lanjut Khofifah, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,1 miliar untuk Paman Desa dengan sasaran 301 BUMDesa. Kemudian anggaran untuk Desa Berdaya senilai Rp 15,1 miliar untuk 151 Desa Mandiri.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah juga turut mengapresiasi 5 desa di Jatim yang masuk dalam 10 ranking tertinggi nasional. Lima desa asal Jatim tersebut antara lain Peringkat 1 Nasional : Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu; Peringkat 2 Nasional : Desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi; Peringkat 3 Nasional Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu; Peringkat 5 Nasional : Desa Gentengwetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi dan Peringkat 9 Nasional : Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

“Selamat atas pencapaian yang telah diraih. Menjadi desa mandiri dan masuk sebagai ranking tertinggi secara nasional adalah bukti keseriusan seluruh komponen desa dalam mewujudkan pembangunan yang maksimal. Dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan terdapat ikhtiar agar terus menekan angka kemiskinan serta mendorong kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” katanya.

Dalam acara ini Gubernur Khofifah turut melakukan

penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Jatim dengan Direktur Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akutansi Negara (PKN STAN) untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa dalam pengelolaan Keuangan.

Dengan adanya penandatanganan kesepakatan ini, Khofifah berharap ke depan akan ada percepatan keakurasian dari seluruh manajemen keuangan yang ada pada BUM Desa di Jatim.

“Jadi para bupati dan Walikota Batu barangkali ada yang butuh penguatan dari manajemen keuangan dari BUM Desa yang ada di wilayahnya masing-masing. Tenuinya kita akan segera membreakdown di perjanjian kerjasama ini sehingga ke depan desa di Jatim bisa terus maju dan mandiri,” katanya. Sementara itu Menteri Desa PDTT RI Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya mengapresiasi Jawa Timur karena meskipun bukan yang pertama dalam hal tidak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal, namun Jatim menjadi provinsi besar yang pertama kali yang mendapatkan penghargaan ini karena terdapat 29 kabupaten dan satu kota yang memperoleh penghargaan. Sebelumnya tercatat tiga provinsi yang dinyatakan bebas desa tertinggal dan sangat tertinggal yaitu DIY, Bali dan Bangka Belitung, tetapi untuk provinsi besar Jawa Timur merupakan provinsi pertama bebas desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan 29 kabupaten dan satu kota yaitu Kota Batu.

Selain itu, ia juga menekankan tentang pentingnya Perpres 104/2021 sebagai bagian semangat penuntasan kemiskinan di 2024. Dimana tidak boleh lagi ada warga desa yang masih punya hak untuk menerima jaring pengaman sosial tapi tidak menerima.

“Prinsipnya adalah tidak boleh lagi di desa ada warga yang berhak menerima jaring pengaman sosial tapi belum mendapat maka wajib Dana Desa melalui BLT dana desa untuk mengcover itu,” katanya.

Ke depan, ia berharap para bupati dan Walikota di Jatim untuk dapat terus melakukan pendampingan dan konsolidasi dengan Kepala Desanya masing-masing terutama terkait tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

“Tentunya juga berharap sekaligus upaya ini untuk penanganan kemiskinan ekstrem yang basisnya dari desa. Kami berharap Jawa Timur menjadi percontohan di dalam penuntasan kemiskinan ekstrem bukan semata-mata untuk konsumsi survei BPS tapi betul-betul tidak ada lagi warga miskin di desa. Jadi ketika orang turun ke desa memang tidak menemukan lagi warga miskin di sana. Inilah yang kita harapkan dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri Desa PDTT bersama Gubernur Khofifah turut meluncurkan Program Desa Berdaya KIP (Kreatif, Inovatif & Produktif) yang ada di 151 desa di Jatim.

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah, para Dirjen Kemendes PDTT, para Bupati se Jatim dan Walikota Batu, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (*)



Salah seorang warga Bendosari memeriksa ikan koi di kolam miliknya.

Masyarakat, khususnya perangkat Desa Bendosari, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, tidak menyangka bila desanya menjadi pemenang I Lomba Desa tahun 2021 tingkat Provinsi Jawa Timur.

“Kami benar-benar tidak menyangka bisa menjadi juara satu,” kata Tiyok Sunaryanto, Kepala Desa Bendosari, kepada Gema Desa.

Desa Bendosari, Kec. Sanan Kulon, tahun 2021 dinyatakan sebagai pemenang I Lomba Desa tingkat Provinsi Jawa Timur. Pemenang II diraih Desa Paringan, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo, pemenang III Desa Pule, Kec. Sawahan, Kab. Madiun, pemenang IV Desa Lobuk, Kec. Bluto, Kab. Sumenep, pemenang harapan I Desa Kemangi, Kec. Bungah, Kab. Gresik, dan pemenang harapan II Desa Sambibulu, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.

Dikatakan oleh Tiyok, keberhasilan Desa Bendosari menjadi pemenang I tidak terlepas dari kekompakan dan kebersamaan dari semua pihak, terutama antara Pemerintah Desa Bendosari dengan lembaga-lembaga desa di Desa Bendosari.

“Karena kebersamaan itu sehingga yang menjadi impian bersama bisa diraih,” kata Tiyok dengan didampingi Sekretaris Desa Bendosari, Susanto.

Dikatakan Tiyok, tingkat kebersamaan penduduknya terbilang cukup tinggi. Ini di antaranya ditunjukkan dalam pembangunan fisik Desa Bendosari. “Selain pembangunan dari DD, masyarakat juga ikut membantu. Pancing-pancingan ada,” katanya sambil tersenyum.

Kebersamaan tersebut sesuai dengan visi Desa Bendosari, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Yang

Desa Bendosari,
Kec. Sanan Kulon, Kab. Blitar

Sejahtera Berkat Sapi dan Ikan Koi

Bersatu, Guyub Rukun, Adem Ayem dan Berkeadilan.”

Desa Bendosari dulu dikenal sebagai desa yang terbelakang. Namun kini bertolak belakang. Warga Desa Bendosari umumnya hidup sejahtera. “Boleh dibilang sekarang ini sulit mencari warga Desa Bendosari yang menganggur,” kata Tiyok.

Ini karena sejumlah perubahan dan inovasi yang terjadi di Desa Bendosari. Pertama adalah budidaya ikan koi. Kedua peternakan sapi perah dan potong.

Dikatakan oleh Tiyok, dulu penduduk Bendosari mayoritas bertani padi. Namun belakangan banyak beralih budidaya ikan koi. “Budidaya ikan koi hampir separoh dari pertanian. Bendosari bagian selatan banyak teral dan kebun yang sekarang beralih fungsi menjadi kolam ikan koi,” kata Tiyok yang lahir tahun 1982 ini.

Di Desa Bendosari terdapat 4 Kelompok Tani, yaitu Toto Tentrem, Mulyosari I, Mulyosari II dan Mina Mulyosari (Kelompok Petani Ikan Koi) yang juga mempunyai dua Kelompok Wanita Tani (Subur Makmur dan Barokah).

Budidaya ikan koi memang menjanjikan. Beternak ikan koi ini memang tidak terlepas dari peran Tiyok dan perangkat desa untuk pengembangan ekonomi warganya.

Menariknya, budidaya ikan koi ini banyak yang terlibat, mulai dari Karang Taruna hingga anak-anak usia SMP-SMA. Mereka umumnya terlibat dalam pemasaran. Cukup bermodal HP, yaitu mengunggah foto dan ukuran ikan koi di aplikasi, mereka sudah mendapat keuntungan.

“Selain budidaya anak-anak muda juga aktif dalam hal penjualan jual secara online, cukup mengunggah foto ikan beserta ukuran dan harganya. Pemasarannya mudah sekali. Pangsa pasarnya bahkan luar Jawa juga,” kata Tiyok yang berlatar belakang kontraktor ini.

Selain terserap di koi, banyak pemuda di Bendosari

yang sekarang tertarik terjun ke ternak sapi, baik sapi perah maupun penggemukan. Jika dulu pemuda enggak menjadi peternak, sekarang mereka berminat. Penyebabnya, mereka tidak harus menyabit rumput untuk pakan sapi.

“Sapi perah masih tetap terbanyak tapi mengalami penurunan. Tinggal orang tua saja. Anak-anak muda malas ngarit. Bagaimana caranya tidak ngarit? Yaitu pakai silase. Ini salah satu terobosan dan inovasi supaya anak-anak muda mau memelihara sapi lagi tanpa harus ngarit setiap hari,” kata Tiyok yang juga peternak sapi potong ini.

Sejak ditemukan silase, banyak anak muda Desa Bendosari yang tertarik menjadi peternak. Membuat silase terbilang mudah. Proteinnya juga tinggi. Siapa pun bisa asal mempunyai alat. Bahan baku cukup dari jagung yang dicacah. Sebagai bahan baku jagung tidak sulit didapat, sebagian bisa didapat di Desa Bendosari dan Blitar.

Penggunaan silase sebagai pakan sapi juga menghemat biaya pakan. Juga tidak perlu susah-susah menyabit rumput. Sekali membuat silase bisa untuk stok satu bulan. Komposisi pakan sapi: satu ekor sapi dalam sehari membutuhkan 25 kg pakan. Dari jumlah itu, 17 dari silase dan sisanya yang 8 kg dari konsentrat.

Untuk peternak sapi perah, peternak di Bendosari menjual susu sapi ke KUD Dadi Jaya yang kebetulan berada di Desa Bendosari. Per liter susu di KUD Dadi Jaya harganya Rp 6.500. Jika petani menjual eceran harganya Rp 8000/liter.

“Kami selalu mendorong anak-anak muda agar terjun di budidaya ikan koi dan ternak sapi. Saya memberi contoh diri saya sendiri,” kata Tiyok yang bergerak di bidang pembibitan sapi dan sekarang mempunyai 40 ekor sapi potong ini.

Ditambahkan oleh Tiyok, proses pemerahan susu, pembuatan silase, dan penggemukan sapi, sebagai ladang usaha masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Sementara itu BUM Desa Makmur Abadi, Desa Bendosari, juga berperan dalam mengubah status Desa

Bendosari. BUM Desa yang berdiri tahun 2016 ini mempunyai tujuan sebagai income generating unit untuk peningkatan pendapatan desa.

Usaha BUM Desa Makmur Abadi meliputi usaha susu dan olahan susu dalam bentuk susu pasteurisasi dan yoghurt, usaha olahan buah meliputi sari buah dan jenang buah, serta usaha wisata edukasi terkait dengan unggulan olahan susu.

Usaha susu dan olahannya dikelola oleh KUD Jaya Abadi, sedangkan olahan buah dikelola langsung oleh BUM Desa. Produk unggulan olahan buah BUM Desa Makmur Abadi adalah jenang buah. Produksi jenang buah integratif dengan sari buah.

Dalam upaya menanggulangi stunting di Desa Bendosari, BUM Desa Makmur Abadi menyalurkan bantuan berupa produk olahan susu sapi segar kepada balita beresiko stunting. “Tidak hanya itu produk susu ini juga masuk sebagai menu PMT pada posyandu balita/ taman posyandu di seluruh wilayah Bendosari,” kata Tiyok.

Desa Bendosari berada 11 km dari Pendopo Bupati Blitar. Desa seluas 170,20 hektar ini termasuk desa yang dialiri Sungai Brantas dan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan data tahun 2020, penduduk Desa Bendosari sebanyak 2.762 jiwa (944 KK) terdiri atas 1.406 laki-laki dan 1.356 perempuan.

Untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Desa Bendosari menerapkan pelayanan dengan motto SIPPATAS, yaitu Sistem Pelayanan Cepat Tanggap dan Tuntas menggunakan aplikasi APFELDESKEKEL.(res)



Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bendosari

- Kepala Desa:** Tiyok Sunaryanto
- Sekretaris Desa:** Susanto
- Kaur Keuangan:** Desi Natalia
- Kaur Perencanaan:** Yusak Widya Candra
- Kasi Pemerintahan:** M. Burhan Mukhlisin
- Kasi Kesejahteraan:** Mochamad Nurhuda
- Kasi Pelayanan:** Abdul Chalim
- Kamituwo Dusun Bendosari:** Suripto Wiyono
- Kamituwo Dusun Balon:** Kusairi



Nangkula Park

Alternatif Wisata di Tulungagung

Berada di Desa Kendalbulur, Kec. Boyolangu, Nangkula Park kini menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Tulungagung. Bercokol di hamparan tanah lapang dan persawahan, setiap hari wisawatan berkunjung di Nangkula Park.

Nangkula Park yang dikelola BUM Desa Larasati Desa Kendalbulur, Kec. Boyolangu, ini awalnya hanya hamparan persawahan. Tahun 2019 diuruk untuk lapangan sepak bola.

“Pembangunan lapangan sepak bola ini masuk dalam RPJM Desa tahun 2014 – 2019, karena Desa Kendalbulur belum mempunyai lapangan sepak bola,” kata Yudi Arti, Sekdes Kendalbulur, didampingi Sekretaris BUM Desa Larasati, Dian Aulia.

Namun dalam perkembangannya tidak hanya lapangan sepak bola, namun juga berdiri café dan gazebo. Tepatnya tahun 2020. Sekarang di atas area seluas 17.500 m² ini sudah berdiri aneka fasilitas, di antaranya pendopo, bianglala, kuda putar, rumah balon dan kereta api-kereta apian. Juga yang menarik adalah mina padi.

Pengunjung dikenakan karcis masuk Rp 2000 untuk anak-anak, dan Rp 5000 untuk orang dewasa. Jam operasional pk 09.00 sampai 21.00, sedangkan akhir pekan mulai pk 07.00 sampai 21.30 WIB.

Sekarang di Nangkula Park BUM Desa





Sumbangan Sadewa diserahkan ke warga.

Larasati mempekerjakan 40 orang karyawan. Dari jumlah karyawan tersebut 20 orang sudah tercover BPJS.

Pada 29 Oktober 2020 Nangkula Park dikunjungi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, lalu Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PK), Muhaimin Iskandar (05/4/21), dan pada Sabtu (22/5/2021) diluncurkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Dikatakan Kepala Desa Kendalbulur, Anang Mustofa, tahun 2020 Nangkula Park memperoleh pendapatan kotor hampir Rp 1,5 miliar.

Diakui Anang, pemasukan dari Nangkula Park digunakan untuk subsidi kebutuhan warga baik bidang kesehatan, pertanian dan bisa membebaskan PBB semua warga masyarakat Desa Kendalbulur. "Karena tidak semua warga miskin bisa tercover oleh program pemerintah pusat," jelasnya.

Kata Anang Mustofa, pihaknya akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 juta setiap



tahunnya, untuk pemberian subsidi pada empat sektor, yaitu subsidi pertanian, subsidi PBB (untuk rumah hunian), subsidi pendidikan dan subsidi kesehatan. Empat program subsidi tersebut diberi nama Sadewo (Santunan dari Desa untuk Warga).

"Sudah dua program Sadewo berjalan, semoga secara bertahap bisa tercapai semuanya. Terima kasih kepada pengunjung/wisatawan Nangkula Park. Dengan berkunjung di sini ikut membantu kemajuan Desa Kendalbulur," kata Anang

Disinggung tentang subsidi untuk sektor pertanian, Anang menjelaskan subsidi tersebut nantinya berupa pemberian benih untuk para petani di Desa Kendalbulur. Dana yang dianggarkan sebesar Rp 60 juta untuk 500 rumah. "Nanti per rumah diberikan satu karung benih, estimasi harganya sekitar Rp 100 ribu per karung, dan berisi 5 kg," tambahnya.

Tahun 2021 BUM Desa Larasati keluar sebagai pemenang I Lomba BUM Desa tingkat Provinsi Jawa Timur.(res)

Pimpin Misi Dagang ke Maluku

Gubernur Khofifah Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Jatim dan Maluku



Gubernur Jawa Timur (empat dari kanan) dan Gubernur Maluku (empat dari kiri) bersama jajaran masing-masing.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin misi dagang ke Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Kamis (2/12). Agenda ini dilakukan sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi dua provinsi tersebut akibat pandemi Covid-19.

Pada misi dagang dan investasi yang digelar di The Natsepa Hotel Resort tersebut, diikuti 132 pelaku usaha dimana 32 pelaku usaha dari Provinsi Jatim dan 100 pelaku usaha dari Provinsi Maluku, yang menyuguhkan berbagai potensi yang ditransaksikan.

Untuk komoditi jual dari Jawa Timur antara lain ialah produk hasil pertanian dengan varietas beras, jagung, bibit tanaman, olahan rempah, sayur dan buah. Selain itu terdapat pula hasil pertanian diantaranya kubis dan kentang. Hasil peternakan diantaranya telur, olahan daging, daging, ayam potong, olahan ikan.

Sedangkan produk hasil perkebunan antara lain kakao dan olahannya, coco fiber, coco peat, rokok, gula, olahan singkong, bawang merah, olahan biji kopi dan aneka kripik, serta hasil produk kelautan diantara-

nya aneka hasil laut.

Tak hanya itu, terdapat pula kerajinan kulit ukir, sepatu, tas perempuan, peralatan dapur, kerajinan kuningan, fashion/ aksesoris, produk mie keriting dan pupuk. Di sisi lain, komoditi beli dari Jawa Timur antara lain rempah, kopra, ikan, cengkeh dan lain sebagainya.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan kerjasama antara Jawa Timur dan Maluku kali ini merupakan proses *resiprokal connection* (hubungan saling berbalasan).

Mantan Menteri Sosial RI tersebut mengatakan bahwa

dari 32 rute tol laut di Indonesia, 27 diantaranya memiliki basis di Surabaya. Oleh karena itu, dirinya menyampaikan jika Pemprov Jatim saat ini tengah membangun konektivitas dengan Asosiasi Shipping Line, dalam rangka memberikan jembatan dan konektivitas yang mudah dan baik bagi beberapa exportir dalam negeri yang melakukan perdagangan antar pulau dan antar provinsi khususnya di wilayah Indonesia Timur.

“Khususnya untuk UMKM. Untuk memenuhi satu kontainer bagi UMKM tidak mudah. Membangun koneksi dengan market akses dalam dan luar negeri sangat penting. Kalau saat ini pada Triwulan Ketiga Ekspor kami memang defisit sebanyak Rp 49 T, tapi perdagangan antar pulau dan antar provinsi surplus sebanyak Rp 174 T,” jelas Khofifah.

Khofifah juga menyebut bahwa Misi Dagang yang digelar Pemprov Jatim juga bertujuan untuk menjalin jaringan pasar yang berkelanjutan dan mendorong potensi komoditi yang ada di masing-masing provinsi.

“Misi Dagang menjadi sarana untuk menggali potensi dan kerja sama antar pelaku usaha, serta meningkatkan kerja sama strategis di sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan investasi”, ungkap Khofifah.

Ke depan, Khofifah juga berharap hubungan antara dua provinsi tidak hanya soal perdagangan saja, tapi juga melebar hingga penguatan industri kreatif dan penguatan SDM termasuk SDM untuk ASN. Terlebih, BPSDM Jatim menjadi satu dari dua provinsi yang

telah ditunjuk Kemendagri dan LAN (Lembaga Administrasi Negara) RI sebagai pelopor *Corporate University* (Corpu).

“Kami ingin setelah ini ada kerjasama antara BPSDM Jatim dan BPSDM Maluku di bidang Corpu. Karena ini akan memberi penguatan SDM di masing-masing institusi baik di level Pemprov ataupun pemkab/pemko di Maluku dengan kami yang ada di Jatim,” katanya.

Hingga pukul 17.18 WIT, total transaksi Misi Dagang dan Investasi antara Jawa Timur-Maluku mencapai Rp 232,74 Miliar. Meski secara sistem telah ditutup tetapi transaksi dagang antar pedagang dan pembeli baik dari Maluku maupun dari Jawa Timur tetap berjalan secara berkelanjutan pasca misi dagang dan investasi ini.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dengan Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, yang diikuti dengan sejumlah kerjasama lainnya antara dinas kedua provinsi.

Diantaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan serta Dinas Koperasi dan UKM.

Sementara itu, Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail mengapresiasi berbagai kain tenun Jawa Timur yang ditampilkan melalui peragaan

busana pada kegiatan Misi Dagang dan Investasi antara Jawa Timur dan Maluku. Dirinya berharap, melalui Misi Dagang dan Investasi ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan kedua daerah.

“Agenda misi dagang dan kerjasama yang dilaksanakan hari ini adalah cermin dari pentingnya mendukung kebutuhan antara dua pemerintah daerah. Jawa Timur sebagai provinsi dengan kemajuan perdagangan dan tingkat perekonomian tinggi dan memiliki pengusaha besar. Kami berharap dapat berinvestasi di Maluku karena kami memiliki sumber daya alam berlimpah, tetapi belum banyak dikelola secara optimal,” ujar Gubernur Maluku.

Lebih lanjut Murad menambahkan, dirinya juga berharap agar kelebihan Jawa Timur dapat ditularkan kepada Maluku. Sehingga produk-produk Maluku dapat mengisi pasar besar di Jawa Timur, dan sebaliknya.

“Karena yang kita lakukan hari ini ialah membangun jembatan antara Maluku dan Jatim, bukan membangun tembok,” ujarnya.

Dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menyatakan, total nilai transaksi pembelian Maluku ke Jawa Timur berada diperingkat kedua setelah DKI Jakarta, dengan jumlah Rp. 2,43 Trilyun atau setara dengan 30,52% diantaranya ialah komoditas pembelian terbesar ialah obat-obatan, minyak diesel dan sepeda motor. Sementara untuk kontribusi Maluku ke Jawa Timur Rp 251,14 Milyar dengan komoditas Tembaga, Ikan Beku dan Kayu Balok.(*)

Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Ponorogo Kemenangan Jadi Acuan Melangkah ke Depan



Suharto, Kades Pondok (empat dari kanan), beserta staf.

Desa Pondok, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, tahun 2021 terpilih sebagai pelaksana terbaik pertama Lomba Kegotongroyongan Masyarakat kategori desa tingkat Provinsi Jawa Timur.

Desa Pondok menyisihkan Desa Madiredo, Kec. Pujon, Kab. Malang (pemenang kedua), Desa Kluncing, Kec. Licin, Kab. Banyuwangi (pemenang ketiga), Desa Sidodadi, Kec. Garum, Kab. Blitar (pemenang keempat).

Kemenangan ini tentu menjadi kebanggaan bagi warga Desa Pondok. “Kami tidak menyangka akan terpilih sebagai pemenang satu tingkat Provinsi. Maju di lomba gotong royong tingkat Ponorogo saja kami tidak ada harapan, tidak tahunya juga nomor satu,” kata Suharto, Kepala Desa Pondok, kepada Gema Desa. Tahun 2021 Desa Pondok menjadi pemenang I Lomba Kegotongroyongan Masyarakat Tingkat Kabupaten Ponorogo.

Ketika ditunjuk mewakili Ponorogo lomba kegotongroyongan masyarakat di tingkat provinsi,

Suharto segera mengumpulkan perangkat dan perwakilan masyarakat untuk meminta pendapatnya. Masyarakat mendukung penuh.

“Alhamdulillah, berkat kegotongroyongan, kerukunan, persatuan dan kekompakan masyarakat, juga dengan LPMD, karang taruna, PKK, RT, akhirnya mewujudkan kemenangan yang sangat luar biasa. Sebenarnya tidak ada di benak saya menjadi yang nomor satu,” kata Suharto sambil tersenyum.

“Kemenangan ini menjai acuan kami untuk melakukan yang terbaik di masa depan,” tambah Suharto.

Dikatakan oleh Suharto, kegotongroyongan masyarakat Desa Pondok sudah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Ada lomba atau tidak ada lomba gotong royong, masyarakat Desa Pondok sudah kompak untuk melaksanakan.

“Kami tidak merekayasa, apa adanya kegiatan di masyarakat. Warisan leluhur masih kuat sekali, penilaian kegotongroyongan, kerukunan, kesatuannya, sangat luar biasa,” kata mantan TKI yang su-

dah tiga periode menjadi Kepala Desa Pondok ini.

Diakui Suharto sangat mudah menggerakkan masyarakatnya untuk bergotong royong, apakah itu kerja bakti untuk fasilitas umum maupun untuk hajatan.

Demikian pula dengan swadaya. Banyak fasilitas umum yang murni dibiayai oleh masyarakat. Sebagai contoh penerangan umum. “Lampu jalan desa seragam di semua RT, itu juga hasil swadaya murni masyarakat,” kata Suharto.

Lalu di setiap RT terdapat pos kamling. Semua dibangun atas biaya masyarakat. Bahkan ada pos kamling yang menghabiskan biaya hingga Rp 50 juta.

Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW yang menjadi agenda tahunan juga murni swadaya masyarakat. Perayaan Mauludan yang dikemas dengan nama Grebeg Maulid Nabi Muhammad SAW ini dipusatkan di Dusun Ngrambang. Perayaan yang menyedot ribuan orang ini berupa karnaval tumpeng keliling desa lalu berakhir dengan syukuran di depan masjid Al Hasan Dusun Ngrambang. Selain tasyakuran Grebeg Maulid ini juga dimeriahkan dengan sejumlah kesenian lokal.

Selain di Dukuh Ngrambang, Grebeg Maulid Nabi Muhammad SAW juga diselenggarakan di Dukuh Kajang dan Krajan Pondok.

Dikatakan oleh Suharto, perayaan Grebeg Maulid Nabi Muhammad tersebut murni swadaya masyarakat. “Setiap RT mengeluarkan tumpeng. Semua biaya untuk peringatan Maulid tersebut bisa sampai ratusan juta,” kata Suharto.

Mantan TKI Jadi Kades



Menjadi kepala desa bukanlah impian Suharto. Ketika pulang ke Desa Pondok setelah lima tahun merantau sebagai TKI di Korea Selatan, tahun 2007, Suharto tidak berpikir menjadi kepala desa.

“Saya tidak berpikir menjadi kepala desa waktu itu. Lha tokoh masyarakat dan ulama yang meminta kepada ibu saya agar menyampaikan ke saya untuk menjadi kepala desa. Warga juga meminta langsung ke saya. Akhirnya saya tidak bisa menolak,” kata pria yang kini berusia 60 tahun ini.

Suharto selama di Korea Selatan termasuk tokoh yang disegani. Dia menjadi ketua perkumpulan TKI asal Jawa Timur. Setiap terjadi permasalahan antar TKI, maka yang dicari dulu Suharto untuk mendamaikan.

Mungkin berkat latar belakang ketokohnya itu Suharto diminta warga Desa Pondok untuk menjadi kepala desa. Dengan menjadi kepala desa warga berharap Suharto bisa membawa perubahan di Desa Pondok.

Pada pemilihan kades tahun 2007, yang hanya ada dua calon, Suharto menang mutlak. Demikian pula dengan pemilihan periode kedua, tidak ada calon lain selain Suharto. Sedangkan untuk periode ketiga, Suharto berhadapan dengan istrinya sendiri lantaran tidak ada warga yang bersedia dicalonkan.

“Sekarang saya dengar-dengar warga mau mencalonkan lagi saya untuk periode keempat. Mau saya berhenti, sudah capai menjadi kepala desa. Saya ingin memberi kesempatan yang lain, terutama yang muda-muda,” katanya.

Dikatakan oleh Suharto, menjadi kepala desa bukanlah mencari pekerjaan tapi mengabdikan ke masyarakat. “Saya ingin mengabdikan di desa saya sendiri. Saya ingin kalau nanti tidak menjadi kepala desa lagi meninggalkan yang terbaik,” ujarnya.

Sebagai kepala desa, Suharto banyak menghabiskan waktunya di lapangan. “Saya paling di kantor hanya setengah jam saja, selebihnya di lapangan. Saya lebih banyak ngopi di warkop bersama masyarakat. Saya gilir. Misalnya sekarang saya di Dukuh Ngrambang, besok di Dukuh Kajang, besoknya lagi di Krajan Pondok. Perangkat dan masyarakat sudah hafal,” katanya.

Selain itu Suharto juga rajin menjalin hubungan baik dengan Pemkab dan DPRD Ponorogo. Diakuinya, sejumlah pembangunan infrastruktur di Pondok berkat hubungan baik dengan anggota DPRD Ponorogo.

Suharto sebagai kepala desa juga bersikap adil ke masing-masing dusun. “Kalau dapat proyek kami bagi rata ke semua perdukahan. Tidak mentang-mentang saya tinggal di Dukuh Krajan Pondok lalu anggarannya lebih banyak ke Krajan Pondok, saya juga bersikap terbuka dan transparan,” katanya. **(res)**

Swadaya lain untuk desa, kata Suharto berupa jimpitan. Setiap malam petugas akan mengambil uang jimpitan yang ditaruh di depan rumah tersebut. Dari uang Rp 500 sampai Rp 1000 dari warga dalam seminggu bisa terkumpul Rp 800 ribu sampai Rp 900 ribu.

“Uang hasil jimpitan tersebut untuk kepentingan umum,” kata ayah seorang anak ini. “Kesadaran dan keikhlasan warga kami untuk desanya sangat luar biasa dan sangat tinggi sekali,” tambahnya.

Kini yang sedang disiapkan perangkat Desa Pondok adalah wisata desa, yang notabene terkait dengan terpilihnya Desa Pondok menjadi pelaksana terbaik pertama. Wisata ini nantinya dikelola oleh BUM Desa Pondok.

Menariknya di Desa Pondok kelompok keseniannya juga aktif. Di Desa Pondok terdapat kelompok reog, yaitu Reog Singo Manunggal dan Singo Muda. Lau di masing-masing dusun juga terdapat kelompok reog sendiri. “Kelompok kesenian kami di setiap dukuh ada, selain reog juga ada kesenian unta, seni ular, seni gajah, kerbau dan hadrah,” kata Suharto.

Keompok reog Singo Manunggal bahkan dua kali menjuarai lomba reog tingkat nasional, yaitu tahun 2009 dan 2010. Lalu Singo Muda tahun 2011 juga juara tingkat nasional.

Desa Pondok terdiri atas tiga dusun, yaitu Dukuh Krajan Pondok, Dukuh Krajang, Dukuh Ngrambang. Saat ini jumlah warga Desa Pondok sebanyak 4.700 jiwa terdiri dari 1020 KK. Mayoritas penduduk Desa Pondok bekerja sebagai petani padi.

Adapun nama “Pondok” menjadi nama desa lantaran dulunya menjadi tempat pondokan atau tempat tinggal sementara orang yang melakukan babat alas Desa Babadan (kini menjadi kecamatan). Dari tempat mondok itu kemudian menjadi nama desa. **(res)**



Cerita Pilu Desa Nagoro yang Ditinggal Penduduknya

Desa Nagoro, desa kecil terpencil di Lembah Iya, Pulau Shikoku, Prefektur Tokushima, Jepang. Penduduknya tak biasa. Ratusan penduduknya bukanlah manusia. Sebuah desa umumnya dihuni oleh manusia yang hidup berdampingan. Namun tidak untuk Desa Nagoro di Jepang yang justru dihuni oleh ratusan boneka. Jumlah boneka di desa itu mencapai 350 buah.

Boneka berwujud seperti manusia itu dibuat oleh warga setempat yang kesepian. Nagoro dulunya memiliki penduduk lebih dari 300 jiwa. Namun, seiring waktu populasinya turun hingga tersisa 35 orang pada Januari 2015. Lima orang meninggal dunia dalam kurun satu tahun setelahnya.

Dikutip dari *Unusual Place*, Desa Nagoro berada di Pulau Shikoku dan berjarak sekitar 550 kilometer dari barat daya Tokyo Jepang. Sebelum era

reformasi, Desa Nagoro adalah salah satu wilayah tambang dan industri yang ramai penduduk.

Terletak di tengah-tengah lembah barisan pegunungan di Pulau Shikoku yang dilintasi oleh aliran sungai berarus deras membuat Desa Nagoro sempat menjadi primadona wisata dan industri di masanya.

Namun, seiring bertambah majunya teknologi dan perekonomian rakyat Jepang, Desa Nagoro lambat laun mulai kehilangan kilaunya.

Tambang di Nagoro Gulung Tikar

Satu per satu tambang dan pabrik industri yang sempat menjadi jantung utama Desa Nagoro mulai gulung tikar karena terkendala masalah finansial. Para penduduk pun secara perlahan mulai meninggalkan Desa Nagoro demi masa depan yang lebih baik. Mereka menca-

ri mata pencaharian baru di desa lainnya.

Pernah ditempati lebih dari 500 penduduk, kini Desa Nagoro hanya ditempati oleh 25 orang penduduk saja. Mereka adalah lansia yang sudah tidak bekerja. Namun, salah seorang penduduk asli Desa Nagoro, Ayano Tsukimi memutuskan untuk menghabiskan masa hidupnya di Desa Nagoro. Namun, desanya sepi bak kota hantu.

Seniman Ayano Tsukimi Pembuat Boneka Penghuni Desa Nagoro

Dikutip dari Wikipedia, Ayano Tsukimi kembali ke Nagoro awal 2000-an untuk merawat ayahnya yang kondisi kesehatannya mulai menurun. Pada 10 Oktober 2017, *National Geographic* pernah merilis artikel tentang karya Ayano Tsukimi di Desa Nagoro. Dia disebut membuat boneka sejak momen-

momen awal kepulangannya untuk merawat sang ayah.

Sebab, Ayano Tsukimi menemukan kampung halamannya tidak seperti masa kecilnya dahulu.

Terlebih lagi, ia harus menghadapi sedihnya ditinggalkan oleh sosok sang ayah. Ayano Tsukimi akhirnya membuat boneka kain mirip sosok sang ayah.

Idenya berawal, Ayano Tsukimi menciptakan orang-orangan sawah yang dipakaikan baju ayahnya untuk mencegah burung memakan biji yang dia tanam di kebunnya. Namun, perlahan-lahan dia mulai membuat boneka lainnya yang mirip dengan tetangganya. Alasan Ayano Tsukimi melakukan hal ini adalah untuk mengusir rasa sepi.

Boneka-boneka ini dibuat seukuran aslinya dengan tongkat kayu, koran untuk mengisi tubuh, kain elastis untuk kulit dan wol rajut untuk rambut. Mereka lalu dipakaikan baju layaknya manusia. Mereka juga mengenakan topi dan sepatu, serta diletakkan sesuai profesi orang yang diserupai.

Setelah jadi boneka-boneka ini disusun Ayano Tsukimi di seluruh pelosok Lembah Nagoro dalam berbagai aktivitas yang membuat mereka tampak hidup. Mulai dari bekerja di ladang, menjaga toko, menunggu bus di halte hingga boneka duduk di tepi sungai seperti orang sedang memancing.

Ayano Tsukimi bahkan mengisi gedung sekolah yang ada di Lembah Nagoro dengan boneka buatannya. Sekolah di Desa Nagoro ditutup pada 2012. Ayano Tsukimi secara berkala mengganti model boneka yang menjadi murid dan

guru. Ada murid yang duduk di balik meja, sedang membuka buku, ada juga boneka guru yang berdiri di depan papan tulis seolah mengajar.

Film Dokumenter Desa Boneka

Apa yang dilakukan Ayano Tsukimi ini pernah dibuatkan film pendek dokumenter oleh sineas bernama Fritz Schumann. Film pendek dokumenter itu berjudul *The Valley of Dolls*. “Saat aku membuat boneka orang-orang yang sudah meninggal. Aku memikirkan masa-masa saat mereka masih sana. Boneka-boneka itu seperti anak-anakku,” ungkap perempuan 67 tahun itu.

Proses pembuatan boneka tersebut biasanya dilakukan selama tiga hari per boneka. Tangannya yang terampil hanya perlu waktu tiga hari untuk membuat boneka berukuran dewasa yang sekarang tersebar di seluruh desa.

Rahasia membuat boneka terlihat hidup? Ayano Tsukimi mengaplikasikan warna pink ke bibir dan pipi boneka dengan kuas make up.

Secara berkala, Ayano Tsukimi memperbaiki boneka-boneka lama kemudian mengembalikan ke tempat semula. Hal itu mengundang wisatawan ke Desa Nagoro. Mereka penasaran melihat desa yang dihuni boneka.

Hingga 2017, dilaporkan Ayano Tsukimi sudah membuat lebih dari 350 boneka. Dia bahkan membuat boneka dirinya. Boneka Ayano Tsukimi biasa ditempatkan di sekitar rumah, kalau tidak melihat tanaman, boneka itu biasa berada di depan penghangat ruangan.

Desa Nagoro pun dikenal sebagai *Kakashi no Sato* atau Desa Orang-orangan Sawah.

Desa di Jepang Kekurangan Penduduk

Anjloknya jumlah penghuni Desa Nagoro menjadi contoh nyata pengaruh penurunan penduduk yang dialami puluhan ribu desa di seluruh Jepang. Parahnya lagi, tingkat kelahiran di negeri Sakura sangat rendah. Artinya, makin sedikit generasi muda untuk mengisi desa-desa yang kekurangan penduduk.

Di sisi lain, jumlah lansia di Jepang malah meningkat sebanyak 20 persen. Sementara itu 40 persen warga Jepang diperkirakan akan pensiun pada pertengahan abad ini. Padahal di saat yang sama, jumlah populasi Jepang diperkirakan anjlok di bawah angka 100 juta.

Jepang berada di ambang menjadi negara “sangat tua” pertama di dunia, yang berarti bahwa 28 persen orang berusia 65 atau lebih. Laporan pemerintah terbaru menunjukkan bahwa 27,7 persen dari total populasi Jepang yang berjumlah 127 juta telah berusia 65 atau lebih. Angka tersebut diperkirakan akan melonjak menjadi 37,7 persen pada tahun 2050.

Menurut para ahli, sekitar 40 persen dari 1.700 kota di Jepang didefinisikan “kehilangan penduduk”. Perdana Menteri Jepang telah berjanji untuk menghidupkan kembali daerah-daerah di luar Tokyo dengan memompa dana puluhan miliar yen, tetapi itu tidak cukup untuk menghentikan orang-orang muda meninggalkan kampung halaman mereka untuk bekerja di Tokyo. (*)

Fasilitasi Sistem Keuangan BUMDesMa



Pada 14-17 November 2021 dilaksanakan Fasilitasi Sistem Keuangan BUMDesMa Tahun 2021 di Hotel Aliante Malang. Acara dibuka oleh Kepala Dinas PMD Prov. Jatim Soekaryo, SH, MM. dengan didampingi Kabid Penataan dan Kerjasama Desa Nenny Herdianawaty, SE, MMA.

Peserta acara Fasilitasi Sistem Keuangan BUMDesMa Tahun 2021 berjumlah 147 orang yang terbagi dalam 2 angkatan (angkatan 1 dilaksanakannya pada 14 sd 15 November 2021 dan angkatan

II dilaksanakan pada 15 sd 16 November 2021 yang terdiri dari unsur bendahara BUMDesMa dari 18 kabupaten.

Dari kegiatan Fasilitasi Sistem Keuangan BUMDesMa tersebut diharapkan peserta dapat memahami sistem pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan sehingga dari kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir dampak penyalahgunaan dalam pengelolaan wewenang keuangan di BUMDesMa.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini dari PT Asta Brata yang merupakan pihak IT yang membuat kontruksi aplikasi sistem laporan keuangan pada BUMDesMa.

Selain itu dilaksanakan penandatanganan MoU dengan pihak ketiga PT EYOS dan PT iCONET dengan BUMDesMa guna percepatan pengembangan BUMDesMa dalam menuju Kemandirian Lembaga Ekonomi Desa di kecamatan berbasis partisipatif. (*)

Rakor BUMDesMa Jatim

Rakor BUMDesMa Jawa Timur tahun 2021 dilaksanakan di Hotel Aston Madiun, 4-5 November 2021. Acara dibuka oleh Kepala Dinas PMD Prov. Jatim Soekaryo, SE, MM dengan didampingi Kabid Penataan dan Kerjasama Desa, Nenny Herdianawaty, SE, MMA.

Peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari unsur ketua BUMDesMa dari 18 kabupaten. Dari kegiatan rakor ini diharapkan peserta dapat memiliki jiwa bisnis dan inovasi terhadap pengembangan terhadap lembaga BUMDesMa yang mereka pimpin sehingga dalam pemenuhan aspek kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan mandiri bisa diwujudkan sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Disamping itu peran Forum Komunikasi BUMdesMa juga sangat penting terutama dalam membantu proses transformasi UPK eks PNPM menjadi BUMesMa sesuai PP No 11 Tahun 2021.

Dalam kegiatan ini peserta langsung dipertemukan dengan pihak ketiga yang menjadi narasumber, antara lain PT Bank UMKM Jatim, PT Eyos, PT iCONET, PT BTN dengan harapan para peserta dapat berinteraksi dan melakukan kerjasama guna pengembangan terhadap BUMDesMa ke depan menuju Kemandirian Usaha Berbasis Ekonomi Partisipatif. (*)

Sinau Nang nDeso di 2 Kabupaten

Sinau Nang nDeso kali ini hadir di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan pada 8 November 2021 dan Desa Tambak Pocok, Kecamatan Tanjung Bumi pada tanggal 9 November 2021.

Pelatihan yang diselenggarakan meliputi: Pelatihan packaging dan marketing online di Desa Telaga Biru pada 8 November 2021, dan pelatihan olahan jambu mente di Desa Tambak Pocok pada 9 November 2021.

Selain di Kab Bangkalan, Sinau Nang nDeso (Sinando) juga hadir di Kabupaten Sidoarjo, di Desa Cemandi, Kecamatan Sedati pada 10 November 2021 dan Desa Simoketawang, Kecamatan Wonoayu pada 11 November 2021.

Pelatihan meliputi pengembangan kuliner (dodol tape telo dan wedhang uwuh instan) di Desa Cemandi pada 10 November 2021, dan pelatihan barista di Desa Simoketawang pada 11 November 2021.

Diharapkan pelaku usaha segera bangkit kembali di masa pandemi untuk membangkitkan ekonomi perdesaan serta ekonomi Jawa Timur. Semangat maju dan semakin sejahtera. (*)

Desa Beranda Depan Pembangunan

Oleh A. Halim Iskandar *)

KETIKA menjadi mahasiswa di IKIP Negeri Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta/UNY) pertengahan 1980-an, kajian-kajian tentang teori-teori pembangunan (development studies) sedang mengemuka. Para akademisi, aktivis, dan pegiat sosial riuh rendah mendiskusikan isu tersebut. Sebagai mahasiswa cum aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), saya ikut larut dalam diskursus tersebut. Pertanyaan yang terlintas dalam benak saya saat itu: jika rumus-rumus developmentalisme ala Rostow dianggap sebagai resep manjur untuk mengontrol negara berkembang semacam Indonesia, dari mana kita harus memulai proses transformasi agar Indonesia segera lepas landas menuju negara maju?

Sebagai anak desa yang waktu itu beruntung bisa menikmati mewahnya bangku kuliah, saya berhipotesis: transformasi itu harus dimulai dari desa. Sebagaimana pernah dikatakan Bung Hatta, "Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa."

Desa adalah ruang teritori terkecil di Indonesia yang punya kompleksitas persoalan so-

sial-ekonomi. Saat itu, ketika saya lulus dari UNY pada 1987, jumlah penduduk miskin perdesaan 20 juta jiwa lebih, sedangkan di perkotaan hanya 9 juta jiwa lebih. Kondisi tersebut masih tetap bertahan hingga saat ini. Rilis BPS Januari 2020 menyebutkan, pada September 2019 penduduk miskin perdesaan 14,97 juta orang, sedangkan di perkotaan hanya 9,86 juta orang.

Maka, tidak salah Tripitono Adi Prabowo (2013) berkesimpulan desa adalah basis evidential untuk mengidentifikasi berbagai problematika pembangunan. Apabila segenap permasalahan sosial-ekonomi di perdesaan teratasi, niscaya sebagian besar tantangan pembangunan di negeri ini dapat kita lewati. Di sinilah urgensi menjadikan desa sebagai beranda depan pembangunan. Pertanyaannya, apa saja prioritas pembangunan yang dapat dilakukan di desa?

Mendorong Ekonomi Desa

Desa adalah ruang hidup bagi 1,5 juta pelaku UMKM. Desa juga ruang bernapas bagi 26 juta keluarga petani dan nelayan. Desa merupakan ruang berseminya para inisiator kemandirian ekonomi desa yang

merintis berdirinya 37.286 BUMN desa. Mereka adalah representasi model ekonomi padat karya yang mampu membawa dampak penyerapan tenaga kerja tinggi dan menggerakkan sektor riil di akar rumput.

Jauh sebelum mendapatkan amanah sebagai menteri desa, PDT, dan transmigrasi, saya sudah menaruh atensi terhadap berbagai problematika pembangunan sosial-ekonomi di desa. Baik dalam kapasitas sebagai pimpinan DPRD di Jombang maupun ketika menjabat pimpinan DPRD Provinsi Jatim. Tentu instrumen yang dapat digunakan sebatas kewenangan sebagai anggota legislatif: mengusulkan atau menyetujui raperda yang terkait dengan desa, sektor pertanian dan kelautan, UMKM, maupun pendidikan dan kesehatan.

Setelah mendapatkan kepercayaan membantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, saya sadar bahwa ruang dan wewenang yang saya dapatkan untuk memajukan desa semakin luas. Salah satunya adalah melaksanakan secara konsisten dan konsekuen amanat yang terkandung dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di antaranya, menjamin tereal-



isasinya dana desa.

Demi mendorong tumbuh kembangnya ekonomi desa, melalui Peraturan Menteri Desa PDTT (Permendesa PDTT) No 11 Tahun 2019, diatur pemanfaatan dana desa hanya untuk pembangunan dan pemerataan melalui kegiatan padat karya tunai desa (PKTD). Tujuannya, pembangunan dan pemerataan (terutama penyediaan infrastruktur) dapat melancarkan alur produksi dan distribusi barang/jasa dari maupun menuju desa. Sehingga dapat menunjang geliat BUMDesa, UKM, maupun

produk olahan hasil pertanian dan kelautan di desa serta dapat menarik para wisatawan untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata berbasis perdesaan. Terjadinya geliat ekonomi desa ditambah dengan pelaksanaan kegiatan padat karya tunai akan menurunkan kemiskinan perdesaan secara signifikan.

Merespons kondisi Indonesia yang dilanda pandemi Covid-19, pada 2 Maret 2020 saya menerbitkan Permendesa PDTT No 6 Tahun 2020 yang salah satu klausulnya menegaskan proporsi pemanfaatan dana

desa lebih besar untuk kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal itu dimaksudkan sebagai stimulus fiskal bagi desa dan dapat terus menggerakkan ekonomi desa.

Tidak lama berselang, dihadapkan pada situasi kedaruratan, dilakukan revisi terhadap Permendesa PDTT No 6 Tahun 2020 dengan Permendesa PDTT No 7 Tahun 2020. Isi kebijakan (policy) itu mengatur pergeseran pemanfaatan dana desa untuk jaring pengaman sosial (JPS), yaitu padat karya

tunai dana desa, desa tanggap Covid-19, serta BLT dana desa yang diperuntukkan warga terdampak dan rentan yang belum ter-cover dalam bantuan sosial lainnya dari pemerintah.

Peran Pesantren

UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjelaskan bahwa pesantren memiliki tiga fungsi, yaitu lembaga dakwah, lembaga pendidikan, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Saya yakin bahwa pesantren punya potensi untuk diajak berkolaborasi menggerakkan perekonomian di desa. Mayoritas lokasi pesantren terletak di desa. Secara sosiologis, karakteristik kebanyakan masyarakat Indonesia masih mendengarkan anjuran dari tokoh-tokoh yang dihormati (dalam konteks ini kita). Apalagi, tidak sedikit pesantren yang memiliki badan usaha mandiri atau lembaga keuangan mikro. Sebagai contoh, di Jatim saja ada 373 baitul mal wa tamwil (BMT), koperasi, maupun jasa keuangan syariah yang dikembangkan pesantren.

Artinya, dalam mengembangkan ekonomi di perdesaan, kita juga harus berkolaborasi dengan berbagai pihak yang punya pengaruh penting bagi proses edukasi masyarakat desa dalam mengembangkan potensi yang ada di desa.

Pendidikan sebagai Katalisator

Salah satu aspek lain yang juga penting adalah pendidikan. Sebab, pendidikan merupakan kunci dari keberhasilan pembentukan sumber daya manusia yang unggul. Untuk itulah, kualitas layanan pendidikan harus terus ditingkatkan, akses terhadap pendidikan harus dipermudah, sarana dan prasarana pendidikan hendaknya dipenuhi, serta tidak kalah pentingnya, kesejahteraan guru harus diperhatikan.

Saya meyakini, pendidikan ibarat eskalator sosial. Semakin tinggi akses seseorang terhadap pendidikan, semakin luas pula kesempatannya untuk naik kelas secara sosial maupun ekonomi. Singkatnya, pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa dan fokus utama pembangunan desa adalah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia desa serta pembangunan ekonomi warga desa.

Jika beranda Indonesia semarak, siapa yang tidak kepingin mampir ke desa? (*)

() A. Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan dan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.*

**Tulisan diolah dari (sebagian) bahan pidato A. Halim Iskandar pada pengukuhan gelar doktor kehormatan (D/HC) bidang manajemen pemberdayaan masyarakat dari UNY, 11 Juli 2020.*



Nangkula Park menarik wisatawan berkunjung ke Desa Kendalbulur, Tulungagung.

Rapat Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa

Dinas PMD Provinsi Jawa Timur melaksanakan Rapat Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, pada 21 sd 22 November 2021 di The Aliante Hotel & Convention.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Dinas PMD Prov, Jatim, Soekaryo, SH, MM ini diikuti oleh Dinas PMD kab/kota, Dispendukcapil kab/kota dan Diskominfo kab/kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan percepatan penerapan teknologi informasi, peningkatan tata manajemen pemerintahan desa serta meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa



dan pelayanan publik yang berkualitas.

Ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Administrasi Pemerintahan Desa dalam rangka menertibkan administrasi pemerintahan desa melalui aplikasi SIMANIS-DESA.(*)



Percepatan Penyaluran Dana Desa



Pada 18-19 November 2021 dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap II Dan III Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. Rapat yang diselenggarakan di Hotel Grand Cakra ini dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dan Kepala Bappeda beberapa kabupaten di Jawa Timur, Kepala KPPN dan perwakilan camat serta



kepala desa.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas PMD Prov Jatim, Soekaryo SH., MM serta didampingi oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Heru Suseno.

Kegiatan ini difokuskan untuk membahas strategi pemerintah desa dalam merealisasikan penyaluran dana desa dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(*)

Ayo, Kenali Remaja Kita

Oleh : Ayu Larasati, M.Psi., Psikolog



Remaja seringkali diidentikkan sebagai sosok yang membangkang, bandel, susah menurut pada orangtua, pemarah, dan lain-lain. Benarkah itu?

Masa remaja adalah masa perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Batasan remaja menurut WHO yaitu remaja awal (10-14 tahun) dan remaja akhir (15-20 tahun). Sedangkan di Indonesia sendiri, batasan remaja yang mendekati batasan PBB adalah kurun usia 15-24 tahun (Sarwono, 2011). Mereka bukan lagi anak-anak, sehingga tidak bisa diperlakukan seperti anak-anak. Namun juga belum mampu dikatakan secara dewasa. Ini seringkali membuat kebi-

ngungan pada orangtua terkait bagaimana cara memperlakukan remaja.

Pada masa remaja sendiri, terjadi perubahan dari segi fisik, psikologis, kognitif, sosial maupun emosional. Secara fisik, mereka mulai mengalami kematangan secara seksual dan muncul perubahan-perubahan lain. Hormon juga seringkali berperan besar terhadap perubahan emosi pada remaja. Remaja mulai disibukkan dengan tubuh mereka dan bagaimana mengembangkan citra individual mengenai gambaran tubuh mereka (Santrock, 1995).

Secara kognitif, remaja mulai terampil berpikir secara ab-

srak, idealis dan logis. Ciri khas mereka adalah pemikiran remaja yang bersifat egosentris. Di mana mereka merasa memiliki penonton khayalan (adolescent egocentrism) yang memperhatikan diri mereka dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ini juga yang membuat remaja menjadi tidak percaya diri saat muncul jerawat kendati hanya berukuran kecil. Dalam pandangannya, seluruh orang memperhatikan hal tersebut padahal kenyataannya tidak. Selain itu, ada juga dongeng pribadi (personal fable) (Santrock, 1995).

Secara konkrit contohnya, remaja perempuan menganggap ibunya tidak mungkin dapat



merasakan sakit yang dirasakan saat putus. Ini karena remaja merasa jika diri mereka adalah unik dan berbeda dari yang lain. Remaja juga perlu diberi kesempatan untuk belajar mengambil keputusan terutama terhadap masalah yang mereka hadapi. Tujuannya, membantu remaja untuk belajar dewasa dan bertanggung jawab pada dirinya.

Yang juga khas pada masa remaja adalah, mereka lebih banyak menghabiskan waktu dan merasa nyaman dengan teman-temannya dibandingkan keluarga. Mengapa? Karena adanya perasaan jika yang memahami mereka adalah teman-teman tersebut. Ini sebabnya, perlu sebagai orangtua untuk terus memantau lingkup pergaulan remaja dan mengarahkannya ke lingkungan yang positif. Bukan dengan menyuruh, namun mengajak diskusi. Karena hakikat remaja adalah 'belajar' untuk menjadi dewasa.

Namun, tetap penting bagi orangtua dan keluarga membangun attachment dengan

remaja. Attachment yang kokoh dengan orangtua akan meningkatkan relasi teman sebaya yang konkret dan relasi erat yang positif di luar keluarga (Santrock, 1995). Kendati attachment remaja dengan orangtua kuat, tidak menutup kemungkinan terjadi konflik dengan orangtua.

Selain karena faktor perubahan biologis pubertas, perubahan kognitif di mana remaja mulai memiliki pandangan ideal terkait orangtua, ada juga faktor perubahan sosial di mana remaja mulai fokus untuk mandiri dan mencari identitas (Santrock, 1995). Seringkali, adanya perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan konflik dengan orangtua. Inilah yang dilihat orangtua, remaja mereka dianggap membangkang dan tidak patuh.

Lalu, bagaimana cara menghadapi remaja?

Sebagai orangtua, pahami jika mereka bukanlah anak-anak. Sehingga terjadi perubahan dan perbedaan.

Ajarkan mereka untuk dewasa dengan memberi kebebasan mengambil keputusan. Ini dengan didahului proses diskusi yang bersifat dua arah. Hindari memerintah, menyuruh, karena akan membuat remaja memberontak.

Ajarkan juga pada remaja terkait konsekuensi dari tindakan sehingga mereka dapat konsisten dengan keputusannya.

Bangun kedekatan dengan saling bercerita tentang aktivitas sehari-hari. Utamakan meluangkan waktu yang santai dimana orangtua dan remaja dapat bercerita dengan nyaman.

Tetap pantau lingkup pergaulan remaja. Jika merasa lingkup pertemanan remaja negatif, jangan langsung menyuruh untuk menjauh dari teman-temannya. Ajak mereka diskusi mendalam sehingga muncul insight. Jangan lupa berikan option lingkup pergaulan yang lain, misalnya ikut les sesuai minat dan lain-lain.

Semoga saran tersebut bermanfaat. (*)

5 Tips Membagi Waktu Antara Pekerjaan dan Keluarga

Anda memerlukan beberapa langkah untuk mengatur waktu di antara pekerjaan dan keluarga.

Mengatur keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, tampaknya menjadi masalah terbesar yang dialami para pekerja. Keinginan untuk memenuhi semua peran seringkali terhambat oleh berbagai tuntutan dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi. Ini membuat banyak dari Anda terjebak pada titik yang tidak seimbang.

Kondisi ini tentunya juga akan memberikan pengaruh tersendiri terhadap hubungan dan keharmonisan antara kerabat kerja dan keluarga. Agar semuanya berjalan lancar, Anda memerlukan beberapa langkah untuk mengatur waktu di antara keduanya.

Berikut tips membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga yang harus Anda lakukan:

1. Membuat Daftar Prioritas

Memenuhi keinginan semua pihak memang tidak mudah. Keterbatasan waktu hingga tuntutan peran memaksa Anda untuk pintar membaginya agar terbagi dalam porsi yang seimbang. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan suatu panduan agar semua kegiatan yang dilakukan dapat terorganisir.

Mulailah membiasakan diri membuat daftar kegiatan yang diurutkan berdasarkan tingkat

urgensinya. Anda dapat menambahkan tanda centang setiap kali Anda menyelesaikan pekerjaan. Pembagian waktu yang lebih terorganisir ini dapat menyeimbangkan urusan pekerjaan dan keluarga.

2. Hindari Penundaan Kerja

Salah satu kesalahan terbesar dalam membagi waktu adalah sering menunda-nunda pekerjaan. Anggapan pekerjaan yang terlihat mudah dilakukan, membuat Anda terbiasa membiarkannya menumpuk. Kebiasaan ini justru mempersempit waktu antara Anda dan keluarga. Anda harus selalu ingat, berbagai aktivitas menanti baik di rumah maupun di kantor.

Dibutuhkan kedisiplinan dalam mengelola semua kegiatan agar tidak bias. Jika semuanya berjalan sesuai porsi Anda, Anda bisa menikmati waktu bersama keluarga dengan nyaman alias tidak membawa pulang pekerjaan yang sudah menumpuk.

3. Luangkan Waktu untuk Menelepon Keluarga

Jauh dari keluarga bukanlah alasan untuk berhenti berkomunikasi. Berbagai pilihan teknologi yang bisa Anda gunakan sebagai media penghubung di waktu senggang saat bekerja. Saat istirahat, luangkan waktu untuk menelepon suami, anak, atau keluarga di rumah. Leparkan pertanyaan hangat sam-

bil bertukar berita tentang kegiatan apa yang telah dilakukan selama hari itu.

4. Tetapkan Batasan antara Pekerjaan dan Keluarga

Penerapan batasan menjadi pelindung agar kewajiban di tempat kerja tidak terganggu oleh keluarga dan sebaliknya. Ini juga memudahkan Anda untuk memilah tindakan apa yang harus diambil. Tindakan seperti ini membantu Anda dalam mencapai keseimbangan yang diinginkan.

5. Kerja sesuai Prioritas

Tidak adanya batasan membuat segala sesuatunya melampaui apa yang seharusnya. Begitu juga dengan masalah antara pekerjaan dan keluarga yang membutuhkan batasan yang jelas. Keinginan untuk menjadi yang terbaik adalah wajar. Bukan berarti Anda bertanggung jawab atas semua pekerjaan, terutama yang bukan kewajiban Anda. Ya, terus-menerus menerima tawaran pekerjaan sama saja dengan mengorbankan kehidupan pribadi dan waktu bersama keluarga.

Jangan selalu menerima ini jika Anda benar-benar tidak mampu atau tidak punya waktu untuk melakukannya. Pertimbangkan dengan cermat semua tawaran pekerjaan terlebih dahulu, terutama jika tawaran itu datang saat istirahat dan akhir pekan. Ingat, kamu juga butuh istirahat. (*)

Kaki Indah Bebas Varises, Ini Cara Pencegahannya

Hati-hati ketika otot mulai menunjukkan gejala seperti membengkak atau ototnya menonjol, bisa saja itu varises.

Varises adalah pembengkakan dan pelebaran pembuluh darah vena yang umumnya terjadi pada bagian kaki akibat penumpukan darah. Bagi seseorang yang mengidap varises, pembuluh vena mereka dapat terlihat menonjol keluar berwarna biru atau ungu tua. Kadang-kadang bentuknya menyerupai simpul atau tali berpilin.

Varises dapat terjadi di semua pembuluh vena pada tubuh. Namun, kondisi ini paling sering terjadi di kaki (terutama betis) karena tekanan yang besar saat kita berdiri atau berjalan. Varises lebih banyak dialami oleh perempuan dibanding laki-laki.

Umumnya, varises ringan tidak akan menimbulkan bahaya. Namun, kadang hal tersebut bisa juga menghambat aktivitas harian karena gejalanya yang semakin memburuk. Varises juga jadi tanda dari masalah kesehatan tertentu, salah satunya adalah *chronic venous insufficiency* (CVI), yakni gangguan aliran darah dari pembuluh darah vena kaki ke jantung.

Penanganan pada Varises

Kondisi varises yang masih tergolong ringan masih bisa ditangani sendiri di rumah. Pengobatan tersebut dilakukan untuk meredakan gejala, mencegah varises bertambah parah, serta menghindari terjadinya komplikasi berupa luka atau pendarahan. Salah satu contoh



penanganan yang bisa dilakukan adalah memakai stoking antivarises atau disebut juga bebat kompres.

Hindari berdiri terlalu lama dan luangkan beberapa saat untuk mengistirahatkan kaki dalam posisi tubuh direbahkan dengan diberi penyangga (posisi kaki lebih tinggi dari badan). Jangan lupa juga untuk selalu menjaga berat badan ideal dan rutin berolahraga.

Jika rasa tidak nyaman atau nyeri akibat varises masih kamu rasakan meski sudah melakukan penanganan di rumah, atau bahkan menimbulkan komplikasi, maka sebaiknya segera menemui ahli medis atau dokter.

Biasanya metode pengobatan yang kemungkinan akan disarankan oleh dokter adalah dengan melakukan operasi pengangkatan pembuluh vena yang mengalami varises dan operasi penutupan pembuluh vena dengan menggunakan bahan khusus berbentuk busa (skleroterapi) atau dengan menggunakan panas (endothermal ablation).

Cara Mencegah Varises

1. Olahraga secara teratur. Tetap bugar adalah cara terbaik untuk menjaga otot kaki yang kencang, darah mengalir, dan berat badan terkendali.
2. Jika memiliki kelebihan berat badan atau obesitas, sebaiknya turunkan berat badan. Kontrol berat badan dapat mencegah penumpukan tekanan berlebih pada vena tungkai dan kaki.
3. Hindari mengenakan pakaian ketat yang dapat menyempitkan aliran darah di selangkangan, lipatan tubuh, atau kaki.
4. Hindari menggunakan sepatu hak tinggi untuk waktu yang lama. Sepatu hak datar atau rendah lebih baik untuk sirkulasi darah karena dapat meningkatkan tonus otot betis.
5. Hindari duduk atau berdiri dalam waktu lama untuk mendorong aliran darah. Jika rutinitas mengharuskan kamu terus-menerus berdiri, pertimbangkan untuk menggunakan sepatu yang nyaman.
6. Regangkan dan latih kaki sesering mungkin untuk meningkatkan sirkulasi dan mengurangi penumpukan tekanan. (*)

5 Resep Olahan Kerang

Kerang merupakan salah satu jenis seafood yang memiliki manfaat buat kesehatan tubuh. Tapi ingat, jangan berlebihan mengonsumsinya.

Kerang memiliki beberapa macam jenis. Namun tak sembarangan kerang bisa dikonsumsi. Ditambah lagi, proses memasak salah satu jenis seafood ini tidak mudah. Jika salah dalam proses memasak kerang, maka kerang menjadi alot dan bau amis akan mendominasi masakan.

Kerang ini kaya kandungan nutrisi yang sangat bagus untuk tubuh. Tetapi dengan catatan bahwa kerang tersebut kondisinya masih segar.



KERANG SAUS PADANG

A. Bahan:

1 kg kerang dara
 ½ buah jeruk nipis
 2 lembar daun salam
 ½ buah bawang bombai, iris tipis
 4 siung bawang putih, geprek
 4 buah cabai merah keriting, iris serong
 2 batang daun bawang, iris serong
 1 ruas jahe, geprek (optional, sesuai selera)
 3 cm lengkuas, geprek
 1 batang serai, geprek
 Minyak secukupnya, untuk menumis

B. Bahan saus:

5 sendok makan saus tiram
 5 sendok makan saus cabai
 5 sendok makan saus tomat
 ½ sendok teh merica
 150 ml air
 Garam secukupnya
 Gula secukupnya

C. Cara membuat:

1. Cuci bersih kerang, lalu rendam dengan air garam dan perasan air jeruk nipis selama 1 jam.

2. Rebus kerang dengan daun salam. Masak hingga kerang matang lalu angkat dan diamkan hingga dingin. Sisihkan.
 3. Panaskan minyak, tumis bawang bombai, bawang putih, jahe, lengkuas, daun salam dan serai hingga harum.
 4. Selanjutnya tambahkan saus tomat, saus tiram, saus cabai, garam, gula, merica dan air. Masak hingga mendidih.
 5. Setelah itu masukkan kerang dan cabai keriting, aduk rata. Masak sebentar sampai saus meresap. Taburi daun bawang saat akan disajikan.

KERANG HIJAU SAUS TIRAM

A. Bahan rebusan:

500 gram kerang hijau beserta cangkangnya, cuci bersih
 2 siung bawang putih, memarkan
 2 cm jahe, memarkan
 2 lembar daun salam
 ½ sendok teh garam
 1 liter air, untuk merebus

B. Bumbu halus:

5 buah cabai merah
 5 siung bawang merah
 3 siung bawang putih

2 cm jahe
 1 buah tomat merah

C. Bahan lainnya:

1 buah bawang bombai, iris memanjang
 10 buah cabai rawit hijau, iris serong
 2 sendok makan saus tiram
 ½ sendok teh garam
 ½ sendok teh gula
 ¼ kaldu bubuk
 ¼ sendok teh merica
 4 sendok minyak, untuk menumis

C. Cara membuat :

1. Rebus kerang bersama dengan bawang putih, jahe, daun salam dan garam hingga cangkangnya terbuka. Angkat lalu tiriskan. Sisihkan.
 2. Panaskan minyak, tumis bawang bombai dan cabai rawit hingga harum. Masukkan bumbu halus, aduk rata. Tambahkan bahan-bahan lainnya, aduk rata dan masak sebentar. Koreksi rasa sesuai selera.
 3. Masukkan kerang, aduk hingga bumbu tercampur rata dan kerang terlumuri. Masak sebentar lalu angkat dan sajikan



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR



SOEKARYO, SH, MM
KEPALA DINAS PMD PROV JATIM



HARI PAHLAWAN 2021

**PAHLAWANKU
INSPIRASIKU**

**SELAMAT
MEMPERINGATI
HARI PAHLAWAN
NASIONAL**

10 NOVEMBER 2021



www.dpmd.jatimprov.go.id



[dpmdjatim](https://www.instagram.com/dpmdjatim)



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa